



**LAPORAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) PROVINSI NTB TAHUN 2024
TRIWULAN II**

**BAPPEDA PROVINSI NTB
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan I Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan II merupakan Laporan evaluasi Capaian Indikator Makro Daerah, Indikator Kinerja Utama, serta pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan II Tahun 2024. Laporan ini mengacu pada RKPD Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2024, terdapat 13 sasaran pembangunan daerah dengan 35 Indikator dan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB. Berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan II, terdapat 148 program prioritas pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.739.587.403.552,00, sedangkan alokasi dalam APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 6.205.414.024.675 atau ada peningkatan sebesar Rp. 465.830.873.247 dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 2.193.670.305.638 atau sebesar 38,22% Jika dibandingkan dengan triwulan I sebesar 22,04% dengan realisasi program masih 19,89 dan realisasi kegiatan sudah mencapai 39,89%. Rendahnya capaian kinerja fisik kegiatan karena sebagian besar masih dalam proses tender terutama yang bersumber dari DAK yang disebabkan keterlambatan penetapan Juknis DAK pada akhir bulan April 2024. Adapun capaian indikator makro daerah pada tahun 2023 sebesar 66,67% pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 sampai triwulan II mencapai 50%. Sedangkan Capaian IKU Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi

NTB 2024-2026 pada tahun 2023 mencapai 50%, sedangkan pada tahun 2024 sampai triwulan II baru mencapai 20% dari 10 (sepuluh) indikator

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, 2024
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I :	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Tujuan	8
1.4 Sasaran.....	8
1.5 Sistematika Penulisan Laporan.....	9
BAB II	10
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024	10
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2024	10
2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	15
BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 TRIWULAN II.....	30
3.1. Capaian Indikator Makro Provinsi NTB Tahun 2023 Dan Triwulan II Tahun 2024 30	
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	31
3.1.2 Tingkat Inflasi.....	33
3.1.3 Tingkat Kemiskinan.....	34
3.1.4 Gini Ratio	36
3.1.5 Indeks Pembangunan Manusia	38
3.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	40
3.2 Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	42
3.3 Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah.....	51
3.4 Evaluasi Terhadap Capaian Pelaksanaan Program Prioritas	71
3.5 Evaluasi terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	33
BAB IV	72
KESIMPULAN DAN SARAN	72
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Rekomendasi	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024	11
Tabel 2. 2 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2024	16
Tabel 2. 3.....	17
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Makro Provinsi NTB	30
Tabel 3. 2 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB, Tahun 2020-2023	39
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 sampai Triwulan II 2024	43
Tabel 3. 4 Progres capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sampai Tahun 2024 triwulan ke II	46
Tabel 3. 5 Indikator Kinerja dari Aspek kesejahteraan masyarakat	51
Tabel 3. 6 Indikator Kinerja dari Aspek daya Saing Daerah	52
Tabel 3. 7 Capaian Aspek Pelayanan Umum Berdasarkan Urusan Pemerintahan	52
Tabel 3. 8 program prioritas tahun 2024	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)	31
Grafik 3. 2 pertambangan bijih logam dan tanpa pertambangan bijih logam	32
Grafik 3. 3 Komponen Pengeluaran Konsumsi	33
Grafik 3. 4 tingkat inflasi	34
Grafik 3. 5 Tren Penurunan Kemiskinan di NTB periode 2014-2024	35
Grafik 3. 6 Tren Ketimpangan Pengeluaran di NTB yang cenderung Stabil pada periode 2017-2024.....	37
Grafik 3. 7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB Tahun 2020-2023.....	38
Grafik 3. 8 Proporsi Pekerja Penuh Dan Tidak Penuh.....	41

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Dengan telah berakhirnya periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023, tahun 2024 merupakan tahun pertama masa transisi kepemimpinan kepala daerah yang dijabat oleh Penjabat Kepala Daerah sampai terpilihnya kepala daerah definitif, sehingga perencanaan pembangunan di daerah disusun sesuai dengan transisi kepemimpinan di daerah. Dalam masa transisi tersebut, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang memerintahkan bahwa Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023, agar menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang baru yang disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan tahun pertama penjabaran RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

RKPD Provinsi NTB Tahun 2024 fokus pada Pembangunan manusia dan lingkungan, meningkatkan produktivitas, daya saing daerah dan penghapusan kemiskinan ekstrim, tahap kedua Penguatan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan dan tahap ketiga Peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan manusia dan lingkungan yang berkualitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan Bali-Nusa Tenggara. Pada

pelaksanaan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 mengusung Tema: ***“Peningkatan Produktivitas Daerah Untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi Melalui Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Berkualitas”***.

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2024 dan RKPD Provinsi NTB tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. NTB TA. 2024
 5. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
 6. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
 7. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
 8. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
 9. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2024 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2024.

1.5 Sistimatika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan sistimatika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistimatika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024;
- Bab III : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan II Tahun 2024. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2024 sampai Triwulan II.
- Bab IV : Penutup

BAB II

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan yang mengacu pada berbagai dokumen perencanaan serta berbagai isu aktual yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan, maka pada tahun 2024 fokus perencanaan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia (*People*), pembangunan lingkungan (*Planet*), Pembangunan kesejahteraan (*Prosperity*), tatakelola (*governance*), pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan daya saing daerah (*Competitiveness*). Selanjutnya diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2024.

Tujuh Tujuan Pembangunan daerah provinsi NTB tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan
2. Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)
3. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri
4. Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri
5. Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah
6. Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
7. Terwujudnya peningkatan daya saing daerah

Adapun 13 sasaran strategis pembangunan daerah provinsi NTB tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah
2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)
4. Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana

5. Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara
6. Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniyah (non fisik)
7. Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan public
9. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah
10. Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
11. Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi
12. Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional
13. Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja IV-5endidik dan pengembangan ekspor.

Adapun target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	
				2024	Utama	Pendukung
I	TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	50-53	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
		Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	6,5	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	
					2024	Utama	Pendukung
	1	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	5.8-7.1	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
			Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	5.2-6.5	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,98	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
II	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	70,88	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan
	2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua OPD Terkait
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua OPD Terkait
			Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	67,67	Dinas Kesehatan	Semua OPD Terkait
			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	257-189	Dinas Kesehatan	Semua OPD Terkait
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24.64-16.85	Dinas Kesehatan	Semua OPD Terkait
	3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	point	68,5	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Semua OPD Terkait
			Persentase kota kreatif	%	30	Dinas Pariwisata	Semua OPD Terkait
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	point	54-60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua OPD Terkait
			Persentase penanganan konflik SARA	%	100	Bakesbangpoldagri	Biro Hukum, Biro Kesra, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas PMD dan Dukcapil
III	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	75,34	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Dinas LHK
	4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,7	Dinas LHK	Semua OPD Terkait
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	point	113,08	BPBD	Semua OPD Terkait

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	
					2024	Utama	Pendukung
			Bauran energi baru terbarukan	%	20,99	Dinas ESDM	Dinas LHK, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR
	5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	65,56	Dinas LHK	Semua OPD Terkait
			Indeks Kualitas Air	point	45,71	Dinas LHK	Semua OPD Terkait
			Indeks Kualitas Udara	point	75-89	Dinas LHK	Dinas Perhubungan
IV	TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI		Angka kemiskinan	%	<10	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Dinas Sosial
			Prevalensi Stunting	%	14	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Dinas Kesehatan
			Gini rasio	angka	0,366	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, DPMPTSP
	6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniyah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	point	68,73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Semua OPD Terkait
			Indeks Ketahanan Pangan	point	77,67	Dinas Ketahanan Pangan	Semua OPD Terkait
			Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Baik	Dinas Sosial	Semua OPD Terkait
			Indeks Demokrasi	point	77,47	Bakesbangpoldagri	Semua OPD Terkait
	7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi	%	2-4	Biro Perekonomian	Semua OPD Terkait
			Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	95	Dinas Kesehatan	Semua OPD Terkait
			Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	43	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Semua OPD Terkait
			Peningkatan Pendapatan per kapita	%	8	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	
					2024	Utama	Pendukung
			Tingkat Literasi Keuangan	%	65-67	Biro Perekonomian	Semua OPD Terkait
V	TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi	point	BB	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Inspektorat
	8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	kategori	A	Dikoordinasikan oleh Sekda/Biro Organisasi	Inspektorat dan Bappeda
	9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	point	Sedang	Bappeda, BPKAD	Semua OPD Terkait, terutama penghasil PAD
VI	TERWUJUDNYA PENINGKATAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)		Persentase Capaian Indikator SDGs	%	63	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
	10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	65	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	60	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	67	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	60	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	
					2024	Utama	Pendukung
VII	TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH		Indeks Daya Saing Daerah	point	3,35	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
	11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	point	77	Dinas PUPR	Semua OPD Terkait
	12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio konektivitas	%	94	Dinas Perhubungan	Semua OPD Terkait
	13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	point	78	BRIDA	Semua OPD Terkait

2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD 2024-2026 disusun berdasarkan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan dan arah kebijakan, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2024 sangat erat dengan tema “Peningkatan Produktivitas Daerah Untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi Melalui Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Berkualitas”. Terdapat 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah pada RPD Tahun 2024-2026. Berdasarkan isu strategis tahun 2024, perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, isu strategis, dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD.

Pembangunan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah Pengelolaan Kesehatan untuk Daya Saing SDM dengan fokus Pengelolaan Pendidikan untuk Daya Saing SDM dengan fokus Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan dengan fokus Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif dengan fokus Pariwisata Andalan dengan fokus Industrialisasi Unggul dengan fokus Meraih Masyarakat Madani (Bahagia)

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan bencana dan perubahan iklim dan memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik.

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan

Sumber : RPD NTB 2024-2026, (Data olahan Bappeda NTB, 2023)

Tabel 2. 2 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD)
Tahun 2024

Tema Nasional	Tema Daerah
" Percepatan Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan "	" Peningkatan Produktivitas Daerah Untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi Melalui Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Berkualitas "
Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)
PN 1	PD 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PD 1)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang (PN 1), (PN 5)
PN 2	PD 2
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PD 3), (PD 4)	Pembangunan Manusia (PN 3), (PN 4)
PN 3	PD 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PD 2)	Pembangunan Lingkungan (PN 2), (PN 5), (PN 6)
PN 4	PD 4
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PD 2), (PD 5)	Pembangunan Kesejahteraan (PN 2)
PN 5	PD 5
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PD 1), (PD 3)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PN 4), (PN 7)
PN 6	PD 6
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PD 3), (PD 6)	Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (PN 6)
PN 7	PD 7
Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PD 5), (PD 7)	Peningkatan Daya saing Daerah (PN 7)

Sumber : Data olahan Bappeda NTB, 2024

Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Program Unggulan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Prioritas Pembangunan Provinsi NTB

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI TANPA TAMBANG (PD 1)		
1	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Program Pengembangan Perumahan
		Program Hubungan Industrial
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Kesejahteraan Rakyat
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan Hutan
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan UMKM
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
PEMBANGUNAN MANUSIA (PD-2)		
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Program Hubungan Industrial
		Program Kesejahteraan Rakyat
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pembinaan Sejarah
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN (PD-3)		
4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Hutan
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Penataan Organisasi
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN (PD-4)		
6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pemberdayaan Sosial

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		Program Pengelolaan Hutan
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Program Hubungan Industrial
		Program Kawasan Permukiman
		Program Kesejahteraan Rakyat
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Pengelolaan Hutan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Penyuluhan Pertanian

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Perekonomian dan Pembangunan
PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH (PD-5)		
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Program Kepegawaian Daerah
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Program Penataan Organisasi
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
PENINGKATAN KOMITMEN DAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) (PD-6)		
10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Program Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
	provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
PENINGKATAN DAYASAING DAERAH (PD-7)		
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Program Administrtasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Program Pengembangan Permukiman
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Penyelenggaraan Jalan
12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Promosi Penanaman Modal
13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Program Penanggulangan Bencana
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Sumber: RKPD Provinsi NTB 2024

BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 TRIWULAN II

3.1. Capaian Indikator Makro Provinsi NTB Tahun 2023 Dan Triwulan II Tahun 2024

Pencapaian indikator makro pembangunan daerah provinsi NTB pada tahun 2023 sampai triwulan II tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Makro Provinsi NTB

Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)
1. Pertumbuhan Ekonomi							
- Dengan tambang Bijih Logam	%		3,66		5,8-7,1	11,06	190,69
- Tanpa tambang Bijih Logam	%	4,5-5,5	4,72	104,89	5,2-6,5	5,02	96,54
2. Inflasi	%	3,0 - 4,0	3,02	100,67	2-4	2,12	100,00
3. Tingkat Kemiskinan	%	11,92	13,85	83,81	<10	12,91	70,90
4. Gini Ratio	Point	0,297	0,375	73,74	0,366	0,361	101,37
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	70,09	72,37	103,25	73,11-73,96	NA	NA
6. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,7-3,1	2,8	100	2,98	3,3	89,26

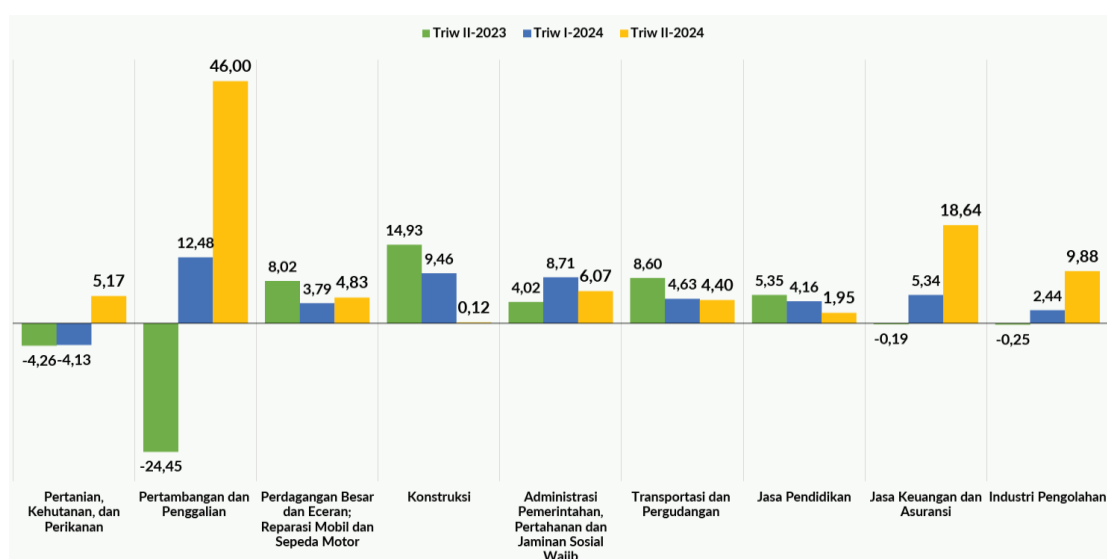
Sumber : BPS Provinsi NTB, 2024

Dari 6 indikator makro provinsi NTB, Pertumbuhan ekonomi NTB dengan tambang sampai triwulan II 2024 mengalami peningkatan sangat signifikan dan telah melampaui target kinerja tahun 2024 sedangkan tanpa tambang masih on progress dengan tingkat capaian 96,54%. Hal yang sama terjadi pada ketimpangan pengeluaran yang mengalami penurunan cukup signifikan sehingga telah melampaui target tahun 2024. Adapun inflasi masih dalam rentang kendali sementara pencapaian tingkat kemiskinan masih on progress sesuai target dan didukung oleh penurunan yang signifikan pada triwulan II mencapai 0,94%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan. Deskripsi pencapaian indikator makro sebagai berikut:

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada Triwulan II-2024 dibanding Triwulan II-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 11,06 persen. Pertumbuhan terjadi pada 17 (tujuh belas) lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 46,00 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 18,64 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,17 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan tumbuh 9,88 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 6,78 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 6,07 persen; dan Jasa lainnya tumbuh 5,61 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki share paling dominan terhadap perekonomian NTB tumbuh sebesar 5,17 persen. Sedangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang share-nya tertinggi ketiga tumbuh sebesar 4,83 persen.

Grafik 3. 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)



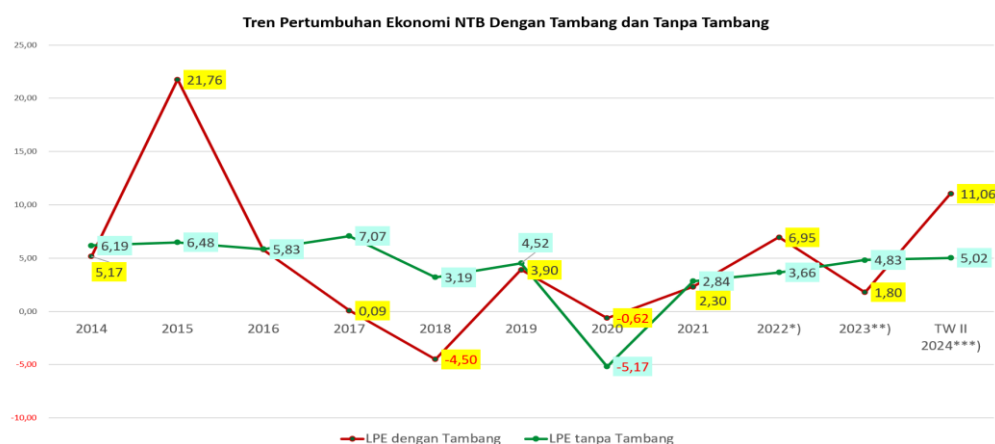
Sedangkan berdasarkan kuartal atau (*q-to-q*) mengalami pertumbuhan sebesar 5,90 persen. Pertumbuhan terjadi pada 16 (enam belas) lapangan usaha sedangkan 1 (satu) lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,17 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,48 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,61 persen. Selanjutnya,

lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 12,47 persen; Transportasi dan Pergudangan tumbuh 8,97 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 8,39 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontraksi adalah Konstruksi sebesar 5,64 persen.

Adapun pertumbuhan ekonomi tidak termasuk pertambangan bijih logam mencapai 5,02%.

Tren pertumbuhan ekonomi NTB baik dengan pertambangan bijih logam maupun tanpa pertambangan bijih logam disajikan sebagai berikut:

Grafik 3. 2 pertambangan bijih logam dan tanpa pertambangan bijih logam

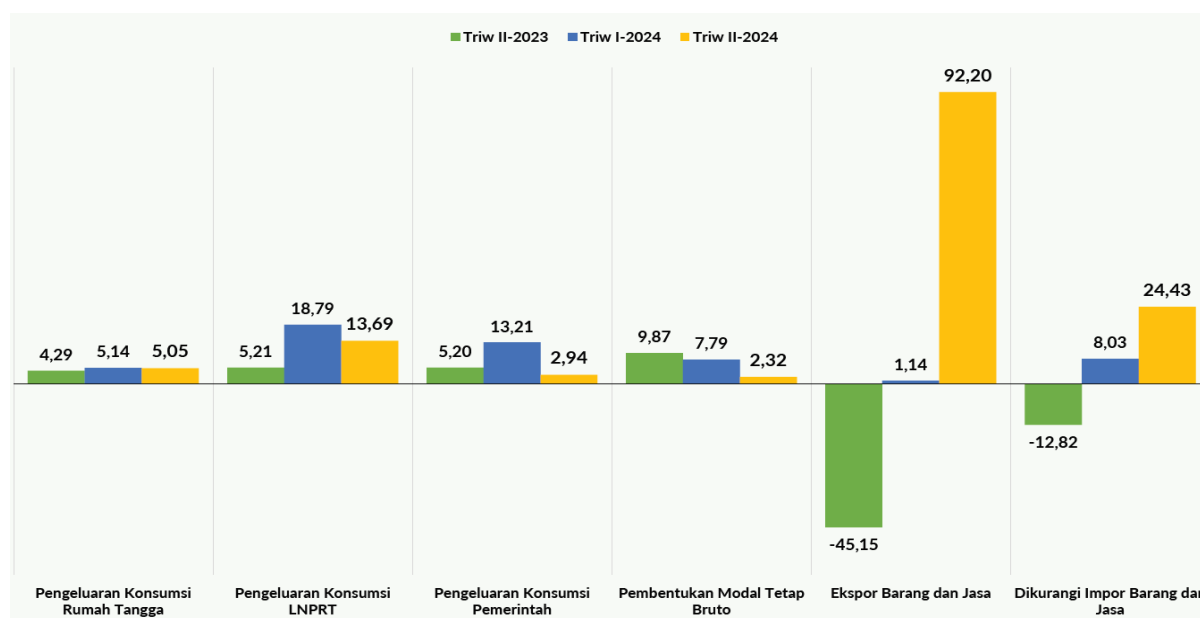


Adanya pertumbuhan yang signifikan pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang mencapai 46,00 persen didukung oleh adanya perpanjangan ijin ekspor hasil pertambangan bijih logam sehingga meningkatkan produktivitas sektor Pertambangan dan Penaggalian; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 18,64 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,17 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan tumbuh 9,88 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 6,78 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 6,07 persen; dan Jasa lainnya tumbuh 5,61 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki share paling dominan terhadap perekonomian NTB tumbuh sebesar 5,17 persen. Sedangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang share-nya tertinggi ketiga tumbuh sebesar 4,83 persen.

Struktur PDRB Nusa Tenggara Barat pada Triwulan II-2024 secara umum masih sama dengan periode sebelumnya. Perekonomian NTB masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,20 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 20,94 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,26 persen; dan Konstruksi sebesar 8,33 persen.

Sementara itu, berdasarkan PDRB Pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada Triwulan II-2024 terhadap Triwulan II-2023 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 11,06 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 92,20 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 13,69 persen. Selanjutnya, Komponen Pengeluaran Konsumsi rumah Tangga tumbuh sebesar 5,05 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 2,94 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 2,32 persen. sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa yang menjadi faktor pengurang tumbuh sebesar 24,43 persen.

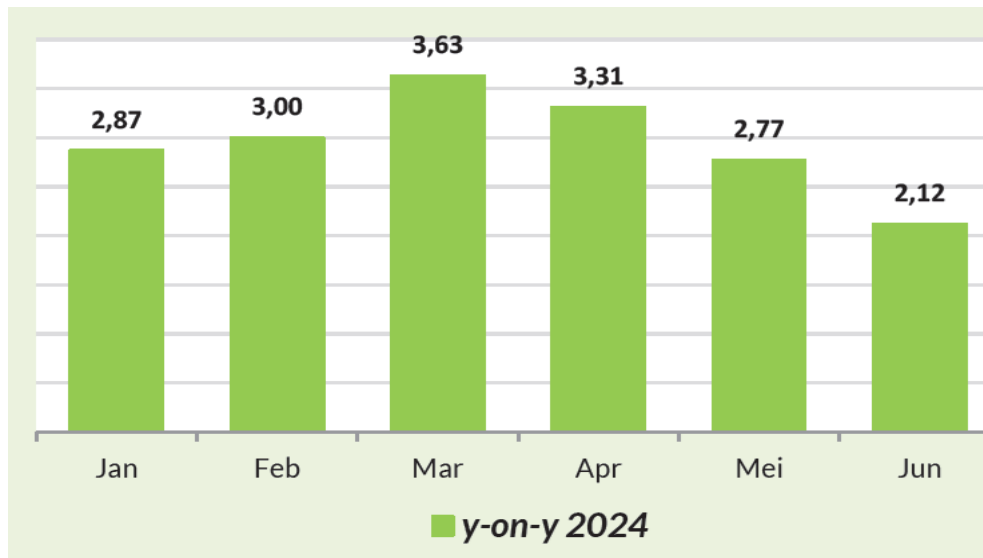
Grafik 3. 3 Komponen Pengeluaran Konsumsi



3.1.2 Tingkat Inflasi

Keberhasilan provinsi NTB dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif juga didukung oleh keberhasilan menjaga stabilitas harga. inflasi yang terjadi pada triwulan II tahun 2024 sebesar 2,12 atau berada dalam interval target pemerintah daerah 2-4%.

Grafik 3. 4 tingkat inflasi



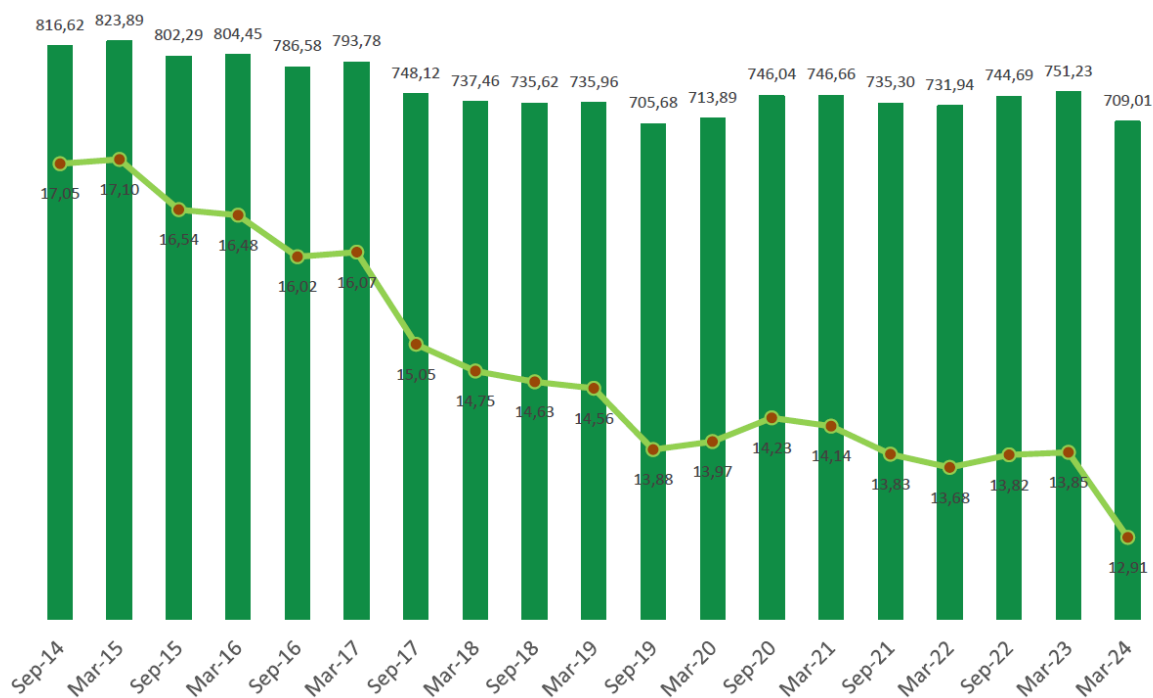
Berbagai terobosan juga telah dilakukan pemerintah provinsi NTB untuk menjaga kestabilan ekonom, diantaranya dengan melakukan pengendalian inflasi melalui sidak pasar, sidak gudang bulog, dan sidak distributor, operasi pasar stabilisasi harga, gerakan pangan murah, menerapkan Peraturan Gubernur NTB No. 38 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah, melakukan konsolidasi Tim Pencatat Komoditas Bahan Pokok Masyarakat, membentuk kampung tanggap inflasi (urban farming), menerapkan digital farming pada klaster tani yang terdapat di Provinsi NTB (Klaster padi Sapurata, Lombok Tengah), serta mendorong gerakan edukasi publik literasi pengendalian inflasi melalui beberapa media antara lain melalui baliho, iklan layanan masyarakat, videotron, media sosial BI dan radio.

3.1.3 Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang positif dan sangat signifikan pada triwulan II tahun 2024, juga diikuti oleh penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Berdasarkan rilis terbaru dari BPS Provinsi NTB, menunjukkan bahwa adanya penurunan signifikan

dalam tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan Maret 2024. Persentase penduduk miskin pada bulan tersebut mencapai 12,91 persen, mengalami penurunan sebesar 0,94 persen poin dibandingkan dengan Maret 2023, dan turun 0,91 persen poin dari September 2022. Dari sisi Jumlah, jumlah penduduk miskin secara absolut mencapai 709,01 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 42,22 ribu orang dari tahun sebelumnya dan 35,68 ribu orang dari dua tahun sebelumnya. Secara spesifik, persentase penduduk miskin di perkotaan menurun dari 13,76 persen pada Maret 2023 menjadi 12,86 persen pada Maret 2024. Sementara itu, di perdesaan, persentase penduduk miskin turun dari 13,95 persen menjadi 12,95 persen dalam periode yang sama. Jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebanyak 14,99 ribu orang, sedangkan di perdesaan berkurang sebanyak 27,23 ribu orang.

Grafik 3. 5 Tren Penurunan Kemiskinan di NTB periode 2014-2024



Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2024 dikarenakan berbagai factor diantaranya inflasi yang relatif terkendali, perekonomian NTB tumbuh positif dan berbagai macam program intervensi kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 merupakan yang terendah sepanjang periode September 2014 sampai Maret 2024.

Adapun Garis Kemiskinan pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar Rp534.703,- per kapita per bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp404.637,- (75,68 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp130.066,- (24,32 persen). Rata-rata anggota rumah tangga miskin di NTB pada bulan tersebut adalah 4,14 orang, sehingga Garis Kemiskinan per rumah tangga mencapai Rp2.213.670,- per bulan.

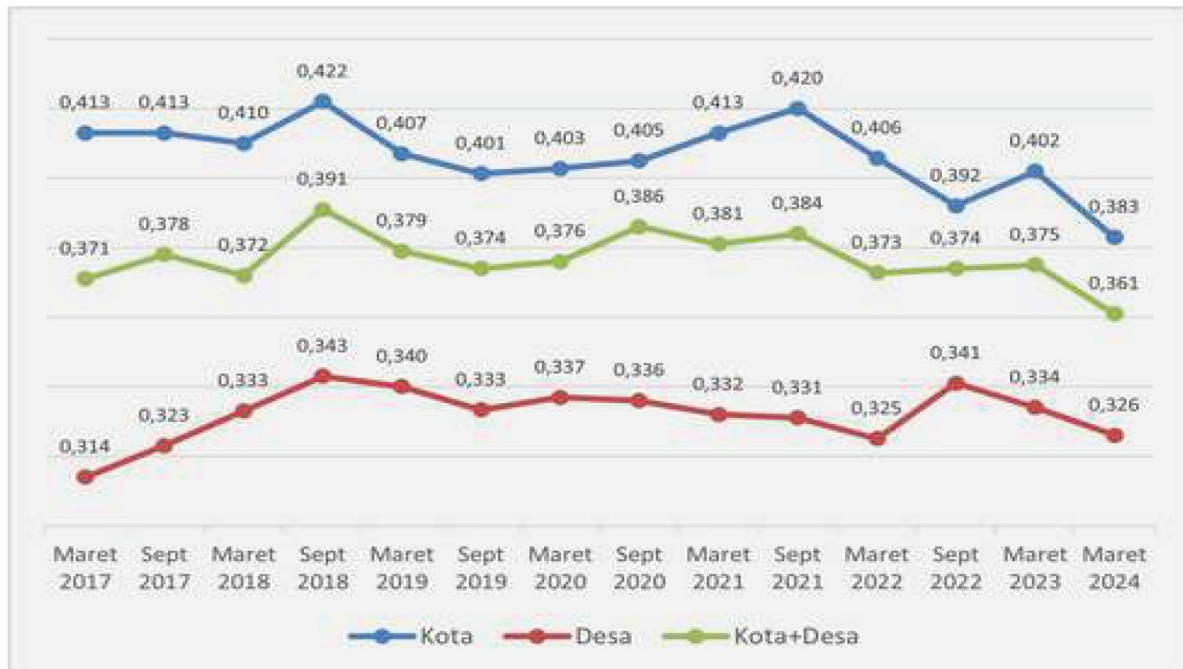
Data ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan di NTB, meskipun masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan kemiskinan di NTB antara lain penguatan dari sisi perencanaan dengan melakukan penyelarasan dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renja) dengan Penganggaran (fokus pada intervensi sesuai dengan data P3KE), pemetaan program dan penganggaran focus penurunan kemiskinan pada OPD, mendorong program dan kegiatan diarahkan untuk pelaksanaan 3 (tiga) strategi sesuai amanat Inpres 4/2022, serta memaksimalkan program insidentil tepat sasaran. Disamping itu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan intervensi memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan ekstrim, pemetaan lokasi kantong kemiskinan dan Kawasan, melakukan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Verifikasi Validasi Desa Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (VVDSKPE), serta memantau pelaksanaan intervensi pada lokasi yang menjadi pelaksanaan program/kegiatan percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Penanggulangan kemiskinan perlu peran multipihak, untuk itu dilakukan koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa dengan kolaborasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat, melakukan koordinasi dengan K/L secara intensif serta koordinasi dengan Non Governmental Organization (NGO) dan Mitra Pembangunan lainnya.

3.1.4 Gini Ratio

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, gini rasio penduduk NTB triwulan II tahun 2024 sesuai dengan rilis BPS Provinsi NTB pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,361. Angka ini menurun 0,014 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2023 yang sebesar 0,375 dan menurun 0,013 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2022 yang sebesar 0,374.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,383; turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2023 yang sebesar 0,402 dan *Gini Ratio* September 2022 yang sebesar 0,392. Sedangkan *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,326, turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2023 yang sebesar 0,334 dan *Gini Ratio* September 2022 yang sebesar 0,341. Dengan demikian, pemerataan pengeluaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat tergolong cukup stabil.

Grafik 3. 6 Tren Ketimpangan Pengeluaran di NTB yang cenderung Stabil pada periode 2017-2024



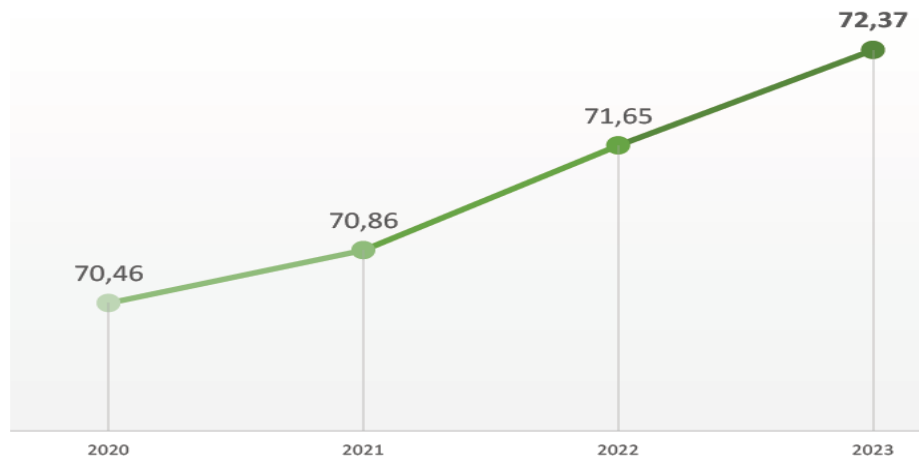
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,11 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan

rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 18,31 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 20,26 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran baik di perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah.

3.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pada dimensi pembangunan manusia, dalam 5 tahun pembangunan manusia terakhir di Provinsi NTB antara tahun 2018 sampai dengan 2023 terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan peningkatan IPM dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Indonesia di Provinsi NTB berada pada kategori tinggi. IPM Provinsi NTB tahun 2020 tercatat sebesar 70,46. IPM Provinsi NTB triwulan I Tahun 2024 belum dirilis, sampai pada tahun 2023 mencapai 72,37, meningkat hingga 1,00 persen dibandingkan tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2020-2023 dikisaran 0,90 persen per tahun.

Grafik 3. 7
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB
Tahun 2020-2023



Peningkatan capaian IPM Provinsi NTB Tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan seluruh komponen pembentuk IPM, terutama rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Pada tahun 2023, komponen pembentuk IPM Provinsi NTB mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali komponen harapan lama sekolah pada dimensi pengetahuan yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3. 2
Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB, Tahun 2020-2023

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	Tahun	71,17	71,33	71,66	72,02
Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,70	13,90	13,96	13,97
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	7,31	7,38	7,61	7,74
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (ribu rupiah)	Rp 000	10 351	10 377	10 681	11 095
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,46	70,86	71,65	72,37

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH Provinsi NTB telah meningkat sebesar 0,85 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,40 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi NTB adalah 71,17 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 72,02 tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Capaian kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2023, HLS Provinsi NTB rata-rata meningkat 1,40 persen per tahun dan RLS Provinsi NTB rata-rata meningkat 2,35 persen per tahun. Pada tahun 2023, HLS Provinsi NTB mencapai 13,97 tahun dan RLS Provinsi NTB mencapai 7,74 tahun. Sedangkan dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat NTB mencapai Rp11,1 juta per tahun. Capaian ini meningkat sebesar 3,88 persen dibandingkan tahun 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Setelah melalui pandemi COVID-19, Pengeluaran per riil kapita yang disesuaikan Provinsi NTB semakin membaik.

Berbagai terobosan telah dilakukan pemerintah provinsi NTB untuk menekan kematian bayi dan kematian ibu, yang salah satunya melalui revitalisasi posyandu. Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu keluarga di NTB cukup signifikan, karena terjadi penambahan jumlah posyandu setiap tahun, sampai tahun 2023 jumlah posyandu menjadi Posyandu Keluarga sebanyak 7.676 Posyandu (100%). Revitalisasi ini dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan penurunan angka stunting. Secara kuantitas telah meningkat dan telah mencapai target yang diharapkan (100%), namun secara kualitas masih harus ditingkatkan lagi khususnya integrasi kegiatan/pelayanan, masih banyak yang belum terintegrasi, baik kegiatan Kesehatan maupun kegiatan dengan sector lain (PAUD, Bank Sampah, BKB, BUMDES, UMKM). Disamping itu, juga dilakukan determinasi terutama pada pernikahan dini, Adanya anggota keluarga yang merokok, pola asuh keluarga balita/Pemberian Makan bayi balita yang tidak tepat, Jaminan Pelayanan Kesehatan, Akses sanitasi dan air bersih dan ibu hamil serta remaja putri tidak mengkonsumsi gizi seimbang dan tablet tambah darah.

3.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 4,10 juta orang, naik sebanyak 68,22 ribu orang dibanding Februari 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 3,03 juta orang (73,97 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 2,93 juta orang penduduk yang bekerja, meningkat sebanyak 169,99 ribu orang dari Februari 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (101,55 ribu orang); Konstruksi (35,62 ribu orang); dan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (22,44 ribu orang). Sebanyak 782,58 ribu orang (26,71 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 1,06 persen poin dibanding Februari 2023. Sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan pekerja penuh (61,09 persen). Sementara pekerja paruh waktu dan setengah penganggur masing-masing sebesar 23,50 persen dan 15,41 persen. Adapun pengangguran mencapai 100,15 ribu orang,

secara persentase, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Februari 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Februari 2024 sebesar 73,97 persen, naik 2,80 persen poin dibanding Februari 2023.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 32,76 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,55 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,21 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama, baik untuk Februari 2023 maupun Februari 2022

Grafik 3. 8 Proporsi Pekerja Penuh Dan Tidak Penuh



3.2 Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah sebagai basis penetapan prioritas, program dan kegiatan prioritas tahun 2024. Berikut disajikan capaian kinerja utama daerah sampai pada triwulan II tahun 2024:

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 sampai Triwulan II 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	TINGKAT CAPAIAN (%)	2024		TINGKAT CAPAIAN (%)
						TARGET	CAPAIAN TW II	
1	Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	49-50	49,96	101,96	50-53	47,31	96,55
2	Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	>5	2,51	50,20	6,5	2,44	48,80
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	70,09	72,37	103,25	73,11-73,96	NA	NA
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	73,18	71,92	98,28	75,34	NA	NA
5	Angka kemiskinan	%	11,92	13,85	83,81	<10	12,91	70,9
6	Prevalensi Stunting	%	16	13,49	115,69	14	12,44	111,14
7	Gini rasio	angka	0,37	0,375	98,65	0,366	0,361	101,37
8	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	BB	B	97,07	BB	NA	97,07
9	Persentase Capaian Indikator SDGs	%	56	56,63	101,13	63	NA	NA
10	Indeks Daya Saing Daerah	poin	3,32	3,44	103,61	3,35	NA	NA

Capaian IKU Pemerintah Daerah pada tahun 2023 mencapai 50%, sedangkan pada tahun 2024 sampai triwulan II baru mencapai 20% dari 10 (sepuluh) indikator. Adapun beberapa capaian indikator yang sangat mengembirakan diantaranya capaian Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB yang terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan ekspektasi yang telah 49,96% dan optimis bisa tercapai diatas 50% sesuai target akhir RPD Provinsi NTB pada tahun 2026. Pada indikator angka kemiskinan, meskipun belum memenuhi target, tetapi penurunan sampai triwulan ke II 2024 cukup signifikan mencapai 0,95% tertinggi dalam 5 tahun terakhir bahkan terprogres kedua se-indonesia. Hal yang sama pada ketimpangan pengeluaran penduduk juga mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 0,361 atau melampaui target sebesar 0,366. Sementara itu, pada indikator prevalensi stunting, mengalami penurunan yang sangat signifikan 13,49% pada tahun 2023, menurun menjadi 12,44% sampai triwulan II tahun 2024.

Adapun sasaran pembangunan daerah yang belum memenuhi target adalah Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Risiko Bencana (IRB), Gini rasio, Indeks Demokrasi, Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial, Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Indeks Inovasi Daerah

Indikator yang sudah memenuhi target sampai triwulan II tahun 2024 yaitu prevalensi stunting yang mengalami penurunan sangat progresif. ketimpangan pengeluaran atau gini ratio juga mengalami penurunan melampaui target, serta Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC) mengalami peningkatan sangat signifikan melampaui target hingga mencapai 97,5% dari target 95%.

Pencapaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah didukung oleh berbagai program sebagaimana telah ditetapkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2024 sebanyak 148 program prioritas pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.739.587.403.552,00, sedangkan alokasi dalam APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 6.205.414.024.675 atau ada peningkatan sebesar Rp. 465.830.873.247 dengan

realisasi mencapai sebesar Rp. 2.193.670.305.638 atau sebesar 38,22% Jika dibandingkan dengan triwulan I sebesar 22,04% dengan realisasi program masih 19,89 dan realisasi kegiatan sudah mencapai 39,89%. Progres Pencapaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Progres capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sampai Tahun 2024 triwulan ke II

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline	2023			2024		
					2022	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian TW II	% Tingkat Capaian
I	TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN		Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	48,24	49-50	49,96	101,96	50-53	47,31	96,55
			Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	3,8	>5	2,51	50,20	6,5	2,44	48,80
	1	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	6,95	5,5-6,9	1,8	32,73	5,8-7,1	4,75	81,90
			Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	3,42	4,7-6,3	4,89	104,04	5,2-6,5	3,01	57,88
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,89	2,7-3,1	2,8	100,00	2,98	3,3	100,00
II	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	69,46	70,09	72,37	103,25	73,11-73,96	NA	NA
			2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,61	8,69	7,74	89,07	9,39
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun			13,96	15,05	13,97	92,82	16	NA	NA
	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun			67,07	67,37	72,02	106,90	72,35-72,68	NA	NA

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline	2023			2024		
					2022	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian TW II	% Tingkat Capaian
			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	257	257	257	100,00	257-189	NA	NA
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24,64	24,64	24,64	100,00	24,64-16,85	NA	NA
	3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	point	17,74	65	66,32	102,03	68,5	NA	NA
			Persentase kota kreatif	%	0	0	0	0,00	30	0	0,00
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	point	54,73	54-60	56,60	104,81	54-60	NA	NA
			Persentase penanganan konflik SARA	%	4 kasus	6 kasus (50%)	2 kasus*	100,00	100	0	NA
III	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	70.56	73,18	71,92	98,28	75,34	NA	NA
	4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,58	19,64	23,01	117,16	19,7	NA	NA
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	point	119,83	115,83	115,9	99,94	113,08	NA	NA
			Bauran energi baru terbarukan	%	20,44	19,18	22,43	116,94	20,99	0	0,00
	5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	65,61	76,61	76,61*	100,00	77	NA	NA
			Indeks Kualitas Air	point	43,39	44,3	47,78	107,86	45,71	NA	NA

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline	2023			2024		
					2022	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian TW II	
			Indeks Kualitas Udara	point	89,3	87,59	90,21	102,99	87,62	NA	NA
IV	TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI		Angka kemiskinan	%	13,82	11,92	13,85	83,81	<10	12,91	70,90
			Prevalensi Stunting	%	32,7	16	13,49	115,69	14	12,44	111,14
			Gini rasio	angka	0,374	0,37	0,375	98,65	0,366	0,361	101,37
	6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniyah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	point	63,81	66,27	56,22	84,83	68,73	NA	NA
			Indeks Ketahanan Pangan	point	75,74	76,67	76,51	99,79	77,67	NA	NA
			Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Kurang Baik	Kurang Baik	Kurang Baik*	100,00	Baik	NA	NA
			Indeks Demokrasi	point	76,19	76,83	70,03	91,15	77,47	0	0,00
	7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi	%	6.3	2-4	2,92	100,00	2-4	3,63	100,00
			Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	89,13	90	97,5	108,33	95	97,5	102,63
			Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	18,85	32	37,71	117,84	43	36,28	84,37
			Peningkatan Pendapatan per kapita	%	6,95	7	7*	100,00	8	NA	NA
			Tingkat Literasi Keuangan	%	65,45	65-67	65-67*	100,00	65-67	NA	NA
V	TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi	point	67,02	BB	B	97,07	BB	NA	97,07

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline	2023			2024		
					2022	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian TW II	
	8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	kategori	BB	BB	BB	100,00	A	NA	NA
	9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	point	1,468	1,171-1,504	1375	100,00	1,504-1,838	NA	NA
VI	TERWUJUDNYA PENINGKATAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)		Persentase Capaian Indikator SDGs	%	50	56	56,63	101,13	63	NA	NA
	10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	56	60	57,52	95,87	65	NA	NA
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	50	55	62,5	113,64	60	NA	NA
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	46	52	48,53	93,33	67	NA	NA
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	50	55	56,67	103,03	60	NA	NA
VII	TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH		Indeks Daya Saing Daerah	point	3,22	3,32	3,44	103,61	3,35	NA	NA

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline	2023			2024		
					2022	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian TW II	% Tingkat Capaian
	11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	point	-	76,61	76,61*	100,00	77	NA	NA
	12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio konektivitas	%	92	93	93,14	100,15	94	93,14	99,09
	13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	point	76,56	77	75,37	97,88	78	NA	NA

3.3 Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah

Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, Indikator Kinerja Daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu:

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3. 5 Indikator Kinerja dari Aspek kesejahteraan masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	5,5-6,9	1,80	32,73	5,8-7,1	4,75	86,36
2	Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	4,7-6,3	4,89	104,04	5,2-6,5	3,01	64,04
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,7-3,1	2,8	100,00	2,98	3,3	100,00
4	Tingkat inflasi	%	2-4	2,92	100,00	2-4	3,63	100,00
5	Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	90	97,5	108,33	95	NA	NA
6	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	32	37,71	117,84	43	NA	NA
7	Peningkatan Pendapatan per kapita	%	7	0,21	3,00	8	NA	NA
8	Tingkat Literasi Keuangan	%	65-67	65-67*	100,00	65-67	NA	NA

Dari 8 indikator kinerja, indikator Inflasi dan Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)

b. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah diukur dengan 10 indikator kinerja meliputi indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Nilai SAKIP, Indeks Kapasitas Fiskal, Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial, Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi, Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan, Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rasio konektivitas, dan Indeks Inovasi Daerah.

Tabel 3. 6 Indikator Kinerja dari Aspek daya Saing Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,64	23,01	117,16	19,7	NA	NA
2	Nilai SAKIP	kategori	BB	BB	100,00	A	NA	NA
3	Indeks Kapasitas Fiskal	poin	171-1,50	1.375,00	100,00	1,504-1,838	NA	NA
4	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	60	57,52	95,87	65	NA	NA
5	Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	55	62,50	113,64	60	NA	NA
6	Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	52	48,53	93,33	67	NA	NA
7	Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	55	56,67	103,03	60	NA	NA
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	poin	76,61	76,61*	100,00	77	NA	NA
9	Rasio konektivitas	%	93	93,14	100,15	94	NA	NA
10	Indeks Inovasi Daerah	poin	77	75,37	97,88	78	NA	NA

Dari 10 indikator kinerja pada aspek daya saing daerah sebagian besar belum dapat diukur pada triwulan II tahun 2024

c. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 223 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 52 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 59 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 68 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 44 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Dari 223 indikator kinerja pada aspek pelayanan umum, sebagian besar belum dapat diukur capaiannya, dan terdapat 14 indikator yang telah memenuhi target. Adapun capaian aspek pelayanan umum sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Aspek Pelayanan Umum Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
1,01	Pendidikan							
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,69	7,74	89,07	9,39	NA	NA
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	15,05	13,97	92,82	16	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
3	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	100	98,50	98,50	100	NA	NA
4	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	100	87,74	87,74	100	NA	NA
5	Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan menengah/ sederajat	%	35,78	35,78*	100,00	36,03	NA	NA
6	Persentase siswa/pelajar yang mengikuti pendidikan karakter	%	100	100*	100,00	100	NA	NA
7	Persentase siswa yang memiliki sertifikasi kemampuan dan keterampilan bahasa inggris (TOEFL/IELTS)	%	10-15	10*	100,00	16-20	NA	NA
8	Persentase sekolah yang melakukan pemilahan sampah sekolah	%	20% (2177 sekolah)	20% (2177 sekolah)*	100,00	25% (2722 sekolah)	NA	NA
9	Persentase lulusan SMK yang mendapatkan sertifikasi LSP P1	%	100	100*	100,00	100	NA	NA
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Retribusi dan LLPAD)	%	6%	1.391,62	23.193,62	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara							
1,02	Kesehatan							
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	67,37	72,02	106,90	72,35-72,68	NA	NA
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100,000 KH	257	257	100,00	257-189	NA	NA
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24,64	24,64	100,00	24,64-16,85	NA	NA
4	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	%	100	100	100,00	100	NA	NA
5	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi	%	100	100	100,00	100	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
6	Persentase keluarga sehat pada setiap posyandu keluarga	%	60-70	15,01	25,02	71-75	NA	NA
7	Persentase Balita Stunting (e-PPBGM)	%	16	13,49	115,69	14	NA	NA
8	Persentase sanitasi layak	%	85,09	83,12	97,68	87,06	NA	NA
9	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mandalika (Retribusi)	%	6%	1.101,67	18.361,20	7-10	NA	NA
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (LLPAD)	%	6%	53,09	884,89	7-10	NA	NA
11	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mata (LLPAD)	%	6%	-7,63	-127,15	7-10	NA	NA
12	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Umum Provinsi (LLPAD)	%	6%	32,16	536,03	7-10	NA	NA
13	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (LLPAD)	%	6%	37,08	617,93	7-10	NA	NA
14	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Manambai (LLPAD)	%	6%	70,84	1.180,59	7-10	NA	NA
1,03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase sanitasi aman	%	8,4	5,53	65,83	11,27	NA	NA
2	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air minum curah lintas kab/kota	%	100	100*	100,00	100	NA	NA
3	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kab/kota	%	100	100*	100,00	100	NA	NA
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	81,44	76,38	93,79	84,10	NA	NA
5	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis	%	25%	25%*	100,00	25%	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Konstruksi	%	2,6-3,2	10,87	418,08	2,6-3,1	9,46	363,85

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
7	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,5	54,5	100,00	57,76	NA	NA
8	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi)	%	6	54,08	901,37	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara							
1,04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1	Persentase pembangunan Rumah layak huni (RLH)	%	64,3	66,31	103,13	66,3	NA	NA
2	Persentase pemenuhan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Provinsi	%	100	90,00	90,00	100	NA	NA
3	Persentase pemenuhan SPM Fasilitas Penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	100,00	100,00	100	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Real Estate	%	1,7-2,1	4,40	258,82	1,7-2,1	3,89	228,82
1,05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100	100,00	100	NA	NA
2	Persentase penyelesaian pelanggaran produk hukum daerah	%	100	100	100,00	100	NA	NA
3	Persentase pemenuhan SPM ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	%	100	100	100,00	100	NA	NA
4	Persentase pemenuhan SPM Bencana Daerah	%	100	100*	100,00	100	NA	NA
5	Indeks Kapasitas Daerah	poin	0,76	0,70	92,11	0,8	NA	NA
6	Cakupan Desa Tangguh Bencana	%	100 (434 destana)	100,00	100,00	33 (242 destana)	NA	NA
7	Indeks Risiko Bencana (IRB)	poin	115,83	115,90	99,94	113,08	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
	* Angka Sementara							
1,06	Sosial							
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Kurang Baik	Kurang Baik*	100,00	Baik	NA	NA
2	Jumlah Kemiskinan ekstrem	%	2	2,64	68,00	0	NA	NA
3	Persentase pelayanan kepada kelompok rentan/disabilitas	%	10	10*		15	NA	NA
4	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	%	100	100	100,00	100	NA	NA
5	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	%	100	100	100,00	100	NA	NA
6	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti	%	100	100	100,00	100	NA	NA
7	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	%	100	100	100,00	100	NA	NA
8	Persentase pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	%	100	100	100,00	100	NA	NA
9	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Sosial (Retribusi)	%	6%	0,00	0,00	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara							
2,01	Tenaga Kerja							
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	poin	66,27	56,22	84,83	68,73	NA	NA
2	Persentase peningkatan upah kerja (UMP)	%	5	2371407 (7,44)	201,49	5	NA	NA
3	Persentase peningkatan remittance	%	10	-18,35	-183,50	17	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
4	Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair	%	30	30*	100,00	30	NA	NA
5	Persentase pencari kerja yang bersertifikat keahlian	%	18,00	18,00*	100,00	20,00	NA	NA
6	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Retribusi)	%	6	-12,12	-202,00	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara							
2,02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Indeks pembangunan gender	poin	90,61	90,61*	100,00	90,65	NA	NA
2	Indeks pemberdayaan gender	poin	53,97	53,97*	100,00	54,39	NA	NA
3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	tahun	20,49	20,49*	100,00	20,53	NA	NA
4	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	31,23	31,23*	100,00	33,15	NA	NA
5	Cakupan Kab/kota yang mendapat penghargaan KLA tingkat madya dan nindya	%	50	40,00	80,00	60	NA	NA
	* Angka Sementara							
2,03	Pangan							
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	76,67	76,51	99,79	77,67	NA	NA
2	Persentase konsumsi komoditi makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin	%	74,47	75,04	100,76	74,4	NA	NA
3	Persentase konsumsi komoditi bukan makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin	%	25,53	24,96	97,77	25,6	NA	NA
4	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	95,7	94,70	98,96	96,8	NA	NA
	* Angka Sementara							

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
2,04	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Air	poin	44,3	47,78	107,86	45,71	NA	NA
2	Indeks Kualitas Udara	poin	87,59	90,21	102,99	87,62	NA	NA
3	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/subsektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon	%	10	10*	100,00	30	NA	NA
4	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem	%	10	10*	100,00	30	NA	NA
5	Persentase pengurangan dan penanganan sampah	%	84	65,31	77,75	90	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	5,3-6,5	3,84	100,00	5,3-6,3	4,47	100,00
7	Pemilahan sampah rumah tangga	%	20-30	20-30	100,00	31-50	NA	NA
8	Pemilahan sampah perkantoran	%	60	60	100,00	70	NA	NA
9	Pemilahan sampah area publik	%	10-30	10-30	100,00	31-60	NA	NA
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	%	6	-24,21	-403,52	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara							
2,05	Pertanahan							
1	Persentase fasilitasi penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA)	%	100	100*	100,00	100	NA	NA
2	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100	100	100,00	100	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
	* Angka Sementara							
2,06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase perekaman KTP	%	100	99,05	99,05	100	NA	NA
2	Rasio Penduduk BerkTP Persatuan Penduduk	%	100	99,16	99,16	100	NA	NA
2,07	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	Persentase desa mandiri dan maju	%	63	71,69	113,79	65	NA	NA
2,08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Pertumbuhan penduduk (%)	%	1,64	1,58	103,66	1,46	NA	NA
2	mCPR (modern Contraceptive Prevalence Rate) : PUS yang menggunakan alat kontrasepsi modern	%	65,0	60,20	92,62	75,0	NA	NA
2,09	Perhubungan							
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Transportasi dan Pergudangan	%	8,2-10	8,14	99,27	8,2-9,8	4,63	56,46
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Darat	%	8,1-9,9	6,00	74,07	8,1-9,7	NA	NA
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Laut	%	7,6-9,3	2,14	28,16	7,6-9,1	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	%	7,0-8,6	7,60	100,00	7,0-8,4	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Udara	%	10-12,3	16,43	133,58	10-12	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pergudangan dan Jasa	%	8,2-10	5,06	61,71	8,2-9,8	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir							
	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dishub (Retribusi dan LLPAD)		6	7,52	125,29		NA	NA
2,1	Komunikasi dan Informatika							
1	Tingkat literasi digital	%	35	35*	100,00	61	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Informasi dan Komunikasi	%	7,6-9,3	4,88	64,21	7,6-9,1	8,16	107,37
3	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	kategori	Kolaborasi	Kolaborasi	100,00	Kolaborasi	NA	NA
4	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	75	55,65	74,20	75	NA	NA
	* Angka Sementara							
2,11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan	%	2-3	3*	100,00	4-5	NA	NA
2	Pertumbuhan produktivitas Subsektor KUKM	%	4,74	4,74*	100,00	4,8	NA	NA
3	Koperasi Modern	%	30	3 Koperasi	66,67	40	NA	NA
4	Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi dan UMKM (Retribusi)	%	6	-17,14	-285,60	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara							
2,12	Penanaman Modal							
1	Persentase Realisasi investasi pada kawasan strategis	%	22,9 T(6%)	39,35 T	171,83	25,4 T(11%)	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
2,13	Kepemudaan dan Olah Raga							
1	Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional	%	5	60,92	1.218,40	7	NA	NA
2	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	11	73,33	15	NA	NA
3	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dispora (Retribusi)	%	6	4,26	70,94	7-10		
2,14	Statistik							
1	Persentase penyediaan data statistik sektoral provinsi dan kabupaten/kota	%	27	27*	100,00	27	NA	NA
2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	65	92,07	141,65	65	NA	NA
	* Angka Sementara							
2,15	Persandian							
1	Persentase aplikasi SPBE yang aman	%	30	69,81	232,70	20	NA	NA
2	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	level	III+	III	90,00	III+	NA	NA
2,16	Kebudayaan							
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	poin	54-60	56,60	104,81	54-60	NA	NA
2,17	Perpustakaan							
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	poin	65	66,32	102,03	68,5	NA	NA
2	Persentase jangkauan layanan perpustakaan mobile ke desa	%	15	15 (desa)	100,00	20	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
2,18	Kearsipan							
1	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	100	94,50	94,50	100	NA	NA
3,01	Kelautan dan Perikanan							
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perikanan	%	2,7-3,4	2,56	94,81	2,7-3,3	NA	NA
2	Produksi Perikanan	ton	1.499.957	1.499.957*	100,00	1.532.501	NA	NA
3	Nilai Tukar Nelayan	poin	110	108,25	98,41	112	NA	NA
4	Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	%	4,79	4,68	97,70	5,07	NA	NA
5	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Retribusi)	%	6	28,75	479,24	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara							
3,02	Pariwisata							
1	Persentase kota kreatif	%	0	0,00	0,00	30	NA	NA
2	Persentase SDM kepariwisataan dengan sertifikasi kompetensi dan bahasa asing	%	343 (25%)	25*	100,00	343 (25%)	NA	NA
3	Persentase pengembangan geosite geopark sebagai lokasi pengembangan green economy dan destinasi eco tourism	%	29 (40%)	40*	100,00	44 (60%)	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	16,3-32,8	8,97	55,03	20,7-32,6	3,97	24,36
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Penyediaan Akomodasi	%	20,7-41,6	9,70	46,86	26-40,7	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Penyediaan Makan Minum	%	12,4-25	8,33	67,18	15,6-24,5	NA	NA
7	Pemilahan sampah perhotelan/destinasi pariwisata	%	10-15	10*	100,00	16-30	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
8	Pemilahan sampah rumah makan dan restoran	%	10-30	10*	100,00	31-60	NA	NA
9	Persentase Desa Wisata yang berprestasi nasional dan internasional	%	100	10*	100,00	100	NA	NA
10	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,35	1,89	56,42	3,45	NA	NA
11	Angka kunjungan wisatawan	orang	1.376.295	1.576.564	114,55	1.690.297	NA	NA
12	Angka Kunjungan Wisata Nusantara	%	10	-5,98	-59,76	15	NA	NA
13	Angka Kunjungan Wisata Mancanegara	%	100	219,18	219,18	100	NA	NA
14	Persentase peningkatan nilai investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	%	N/A	2*		10	NA	NA
15	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pariwisata (Retribusi)	%	6	2.779,80	17.054,01	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara							
3,03	Pertanian							
1	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha pertanian	%	854.480 (10%)	10,0*	100,00	939.928 (10%)	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,7-4,6	2,05	55,41	3,7-4,5	NA	NA
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	%	4,0-4,8	1,94	48,50	4,0-4,7	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Tanaman Pangan	%	4,5-5,6	1,39	30,89	4,5-5,4	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Tanaman Hortikultura	%	2,7-3,3	1,08	40,00	2,7-3,3	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perkebunan	%	1,8	0,56	31,11	1,8	NA	NA
7	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Pertanian dan Perburuan	%	5,2-6,0	2,20	42,31	4,0-4,7	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
8	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Peternakan	%	4,2-5,1	4,51	107,38	4,2-5,0	NA	NA
9	Nilai Tukar Petani	poin	>105	122,81	116,96	>105	NA	NA
10	Kontribusi PDRB Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	16,80	17,48	104,05	16,52	NA	NA
11	Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	3,70	3,78	102,16	3,75	NA	NA
12	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Retribusi dan LLPAD)	%	6	-44,34	-738,92	7-10	NA	NA
13	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Retribusi)	%	6	-48,90	-814,92	7-10	NA	NA
3,04	Kehutanan							
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	65,58	66,60	101,56	65,56	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	%	1,9-4,3	0,37	19,47	3,5-4,2	12,48	143,45
3	Persentase penanganan lahan kritis	%	2-3	2*	100,00	3-4	NA	NA
4	Persentase pemulihan sumber-sumber mata air yang telah hilang	%	10-15	10*	100,00	16-20	NA	NA
5	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	%	100	100*	100,00	100	6,50	97,01
6	Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di sekitar lingkaran hutan	%	287 desa yang keluar dari kemiskinan/mandiri			30 % dari 200 desa miskin	NA	NA
	* Angka Sementara							
3,05	Energi dan Sumberdaya Mineral							

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Bauran energi baru terbarukan	%	19,18	22,43	116,94	20,99	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertambangan dan Penggalian	%	8,7-9,5	-10,39	-119,43	7,8-9,4	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	%	2,5-3,1	6,47	258,80	2,5-3,0	3,79	56,57
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Listrik dan Gas	%	6,7-8,2	5,04	75,22	6,7-8,0	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Ketenagalistrikan	%	6,7-8,2	5,04	75,22	6,7-8,0	NA	NA
	* Angka Sementara							
3,06	Perdagangan							
1	Persentase peningkatan ekspor	%	80-90	-33,86%	-5,05	91-95	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,3-8,6	6,94	103,58	6,7-8,4	2,44	67,78
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	%	5,7-7,0	14,53	254,91	5,7-6,9	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	%	6,4-8,8	5,69	88,91	6,9-8,7	NA	NA
5	Pemilahan sampah pasar	%	10-30	10*	100,00	31-60	NA	NA
6	Pengeluaran Per Kapita	Rp, Ribu	10.910	11.095,00	101,70	11.364	NA	NA
3,07	Perindustrian							
1	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha industri	%	638M-753M	3,50		10	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Industri Pengolahan	%	3,6-4,8	2,51	69,72	3,9-4,7	NA	NA
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Makanan dan Minuman	%	2,7-3,4	2,89	107,04	2,7-3,3	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pengolahan Tembakau	%	5,3-6,5	0,79	29,26	5,3-6,4	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	%	4,8-5,8	4,28	158,52	4,8-5,7	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	%	4,2-9,4	2,06	49,05	7,6-9,2	NA	NA
7	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	%	1,6-2,8	7,27	454,38	3,4-4,4	NA	NA
8	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	%	3,8-4,6	1,02	26,84	3,7-4,5	NA	NA
9	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	%	3,3-4,0	4,11	124,55	3,3-3,9	NA	NA
10	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Barang Galian bukan Logam	%	2,4-3,0	3,48	145,00	2,4-2,9	NA	NA
11	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Logam Dasar	%	4,9-5,4	3,46	70,61	4,4-5,3	NA	NA
12	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	%	3,7-5,2	3,39	91,62	4,0-5,1	NA	NA
13	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Alat Angkutan	%	4,4-5,5	0,48	10,91	4,4-5,4	NA	NA
14	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Furnitur	%	3,9-8,6	5,69	145,90	7,0-8,4	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
15	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	%	8,7-10	1,47	16,90	3,9-4,7	NA	NA
16	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	%	6	-5,06	-84,27	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara							
3,08	Transmigrasi							
1	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan	%	23,61	23,61*	100,00	25	NA	NA
2	Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri	%	49	49,0*	100,00	49,53	NA	NA
	* Angka Sementara							
4,01	Administrasi Pemerintahan							
1	Capaian prestasi daerah	angka	25	25*	100,00	27	NA	NA
2	Persentase rumah ibadah yang telah dibantu/difasilitasi	%	3576 (25%)	83,70	334,80	4341 (25%)	NA	NA
3	Persentase pondok pesantren/lembaga pendidikan agama yang telah dibantu/difasilitasi	%	382 (25%)	86,32	345,28	498 (25%)	NA	NA
4	Persentase program distribusi Baznas NTB untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi produktif, dakwah dan advokasi	%	95-100	95*	100,00	95-100	NA	NA
5	Indeks Pelayanan Publik	poin	3,75	3,97	105,87	3,8	NA	NA
6	Persentase perjanjian kerjasama regional dan internasional yang telah diselesaikan dari MoU yang telah disepakati	%	20 (25%)	25*	100,00	20 (25%)	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
7	Pemilahan sampah madrasah/pondok pesantren	%	30% (799 Ponpes)	30*	100,00	30% (799 Ponpes)	NA	NA
8	Jumlah Lapangan usaha yang berkembang dari prospektif menjadi unggul	lapangan usaha	15	15*	100,00	17	NA	NA
9	Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari andal menjadi prospektif	lapangan usaha	15	15*	100,00	17	NA	NA
10	Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari tertinggal menjadi andal	lapangan usaha	18	18*	100,00	15	NA	NA
11	Persentase peningkatan penerimaan PAD (Retribusi)	%	6	34,67	577,80	7-10	NA	NA
12	Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	%	6	34,71	578,49	7-10	NA	NA
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	* Angka Sementara							
5,01	Perencanaan							
1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	kategori	Baik	Baik	100,00	Baik	NA	NA
2	Perkembangan jumlah mitra pembangunan	angka	143	98,00	68,53	153	NA	NA
	* Angka Sementara							
5,02	Keuangan							
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	%	5,7-7,0	-1,20	-21,05	5,7-6,8	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Perantara Keuangan	%	5,4-6,7	-3,09	100,00	5,4-6,5	NA	NA
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Asuransi dan Dana Pensiun	%	6,3-7,7	3,56	100,00	6,3-7,6	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Keuangan Lainnya	%	6,6-8,0	6,61	100,00	6,6-7,9	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Penunjang Keuangan	%	5,8-7,2	5,12	100,00	5,8-7,0	NA	NA
6	Persentase pertumbuhan PAD	%	30,5	21,63	70,93	2,95	NA	NA
7	Peningkatan Pendapatan transfer	%	0,01	0,03	342,18	-4,5	NA	NA
8	Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah	%	-97,22	58,68	-60,36	-100	NA	NA
9	Kepatuhan ketentuan alokasi pendidikan	%	20	24,08	120,40	20	NA	NA
10	Kepatuhan ketentuan alokasi kesehatan	%	10	29,16	291,60	10	NA	NA
11	Kepatuhan ketentuan alokasi infrastruktur	%	25% dari penerimaan dana transfer	16,02	64,08	25% dari penerimaan dana transfer	NA	NA
12	Kepatuhan ketentuan alokasi pengawasan	%	0,6% dari APBD (Rp 4-10T)	0,43	71,67	0,6% dari APBD (Rp 4-10T)	NA	NA
13	Kepatuhan terhadap ketentuan alokasi kebencanaan	%	1% dari APBD			1% dari APBD	NA	NA
14	Persentase peningkatan retribusi dan LLPAD pada BPKAD	%	6	568,50	9.474,92	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara							
5,03	Kepegawaian							
1	Indeks Profesionalisme ASN	poin	0,71	0,77	108,45	0,73	NA	NA
2	Dimensi Kualifikasi	%	14	0,21	1,50	14	NA	NA
3	Dimensi Kinerja	%	25	24,94	99,76	25	NA	NA
4	Dimensi Disiplin	%	5	5	100,00	5	NA	NA
5,04	Pendidikan dan Pelatihan							
1	Dimensi kompetensi	%	27	26,22	97,11	29	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada BPSPDM (Retribusi dan LLPAD)	%	6	-19,13	-318,89	7-10	NA	NA
5,05	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase peningkatan penerima beasiswa NTB	%	15%	15*	100,00	15%	NA	NA
2	Jumlah Inovasi dan teknologi yang telah diadopsi dan diterapkan dalam skala industri	unit	20-25	20*	100,00	25-50	NA	NA
	* Angka Sementara							
5,06	Penghubung							
1	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	%	86-90	95	110,47	91-95	NA	NA
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi)	%	6	15,72	262,03	7-10	NA	NA
6,01	Pengawasan							
1	Penurunan temuan	%	<5	3*	540,00	<5	NA	NA
2	Opini BPK	kategori	WTP	WTP	100,00	WTP	NA	NA
	* Angka Sementara							
7,01	Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Persentase penanganan konflik SARA	%	6 kasus (50%)	2 kasus*	100,00	100	NA	NA
2	Indeks Demokrasi	poin	76,83	70,03	91,15	77,47	NA	NA
3	Persentase kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan karakter bangsa	%	25%	25*	100,00	25%	NA	NA
4	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,89	4,48*	100,00	5,11	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
	* Angka Sementara							

3.4 Evaluasi Terhadap Capaian Pelaksanaan Program Prioritas

Berdasarkan program-program sebagaimana telah ditetapkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2024 sebanyak 148 program prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.739.587.403.552,00, sedangkan alokasi dalam APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 6.205.414.024.675 atau ada peningkatan sebesar Rp. 465.830.873.247 dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 2.193.670.305.638 atau sebesar 38,22% Jika dibandingkan dengan triwulan I sebesar 22,04% dengan realisasi program masih 19,89 dan realisasi kegiatan sudah mencapai 39,89%. Adapun capaian pelaksanaan program prioritas tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 8 program prioritas tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
I	TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	55-57		50-53		47,31		96,55		
		Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	>10		6,5		2,44		48,80		
	1 Meningkatkan lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	6.2-7.8		5.8-7.1		4,75		81,90		
		Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	5.7-7.8		5.2-6.5		3,01		57,88		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,63		2,98		3,3		89,26		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan	Persen	6,73	3.917.698.181	4,56	3.863.608.402	6	119.622.150	100,80	1,84	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	272276	20.899.885.534	261703	22.819.367.645	19.087	155.956.800	7,29	0,92	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	993194	4.973.744.707	973624	4.780.608.138	194.725	63.854.000	20,00	1,21	Dinas Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	Persen	83 - 100	1.623.538.432	80 - 100	1.560.494.456	22	30.555.000		4,22	Dinas Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	186807	246.328.407	176083	236.763.175	42.290	5.343.000	24,02	7,41	Dinas Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Keberhasilan Sistem Pelayanan dan Pengawasan Terintegrasi Angkutan Laut dan Penyeberangan	Persen	8,08	2.967.241.344	4,49	5.212.308.140	20	19.310.000	50	16	Dinas Perhubungan
			Persentase Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Persen	80		20						Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.146.000.000		632.000.000		9.284.472	2,5	2,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.507.000.000		1.183.000.000		46.102.000	14,19	15,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dok	6	21.661.355.429	6	17.745.940.625		-			Dinas Perindustrian

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	ekor	Sapi 1.332.891 Ekor, Kerbau 105.487 Ekor, Kambing 755.091 Ekor dan Unggas 68.079.137 Ekor	73.729.375.000	Sapi 1.256.378 Ekor, Kerbau 103.409 Ekor, Kambing 684.890 Ekor dan Unggas 53.539.508 Ekor	55.750.000.000		77.650.000		0,49	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian	Persen	75	2.380.500.000	75	1.800.000.000		77.650.000		0,49	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak Yang Terinfeksi PHMS	Persen	5	10.381.625.000	5	7.850.000.000		61.320.840		10,83	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan	Persen	100	1.388.625.000	100	1.050.000.000	#####	5.405.000		2,78	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	Persen	25	3.914.350.000	15	3.235.000.000					Dinas Pariwisata
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	Persen	80	580.800.000	60	480.000.000	20,0	5.920.000	25,0	11,84	Dinas Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	Persen	90	1.815.000.000	85	1.500.000.000	40,0	567.000.000	44,444	29,66	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	Persen		71.020.560.000		74.971.346.000		761.230.000		7,46	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	Persen		85.350.085.000		76.600.085.000	-	14.720.621.500	-	19,33	Dinas Pertanian dan Perkebunan
			Persentase Peningkatan Penerapan LP2B	Persen	100		90						Dinas Pertanian dan Perkebunan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pengendalian OPT dan Penanganan DPI	Persen	67,9	3.625.850.000	67,7	3.357.100.000					Dinas Pertanian dan Perkebunan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen	70	6.750.160.000	60	5.841.000.000	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan
			Petani yang menerapkan teknologi	Persen	80		70			41.600.000	-	16,64	Dinas Pertanian dan Perkebunan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			<i>Kelembagaan Petani yang meningkat kapasitasnya</i>	<i>Persen</i>	20		18		-	50.000.000		16,67	<i>Dinas Pertanian dan Perkebunan</i>
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	<i>Persentase Pengelolaan DAS yang Dioptimalkan</i>	<i>Persen</i>	100	283.100.000	100	235.000.000					<i>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>
II	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	74,62-75,46		73,11-73,96		NA		NA		
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	10,94		9,39		NA		NA			
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	18		16		NA		NA			
		Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	73,01-73,32		72,35-72,68		NA		NA			
		Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	257-189		257-189		NA		NA			
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24.64-16.85		24.64-16.85		NA		NA			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Cakupan Kunjungan Pasien</i>	<i>Persen</i>	100	91.052.661.079	100	74.465.009.156	1	-	-	-	<i>RS Umum Provinsi</i>
			<i>Persentase SPM yang mencapai target</i>	<i>Persen</i>	81	20.675.000.000	79	37.105.000.000	747	1.734.782.135	42	39	<i>RS Jiwa Mutiara Sukma</i>

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat	Persen	90	125.027.000.000	90	48.259.000.000	#####	542.046.944	1,57	1,57	RS Mandalika
			Persentase SPM mencapai target	Persen	85	151.224.581.000	82	125.409.172.000		67.437.669	-	13,49	RS Manambai
			Persentase RS yang memenuhisarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000					RS Mata
			Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10%	Persen	100	162.802.000.913	100	128.529.344.985	29.746		6,900		Dinas Kesehatan
			Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian anak 5% per tahun	Persen	100		100		66.855		15,490		Dinas Kesehatan
			Persentase kabupaten/ kota yang telah melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan wilayah kerja	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik	Persen	90		70						Dinas Kesehatan
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah	Persen	100		100						Dinas Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			<i>terpencil dan sangat terpencil sesuai standar</i>										
			<i>Persentase Puskesmas yang menerapkan BLUD</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>		<i>90</i>						<i>Dinas Kesehatan</i>
			<i>Persentase Balita Wasting</i>	<i>Persen</i>	<i>6</i>		<i>7</i>		<i>0</i>				<i>Dinas Kesehatan</i>
			<i>Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (SDG's)</i>	<i>Persen</i>	<i>3,5</i>		<i>3,5</i>		<i>0</i>				<i>Dinas Kesehatan</i>
			<i>Proporsi KK dengan akses sanitasi layak</i>	<i>Persen</i>	<i>91</i>		<i>88,54</i>						<i>Dinas Kesehatan</i>
			<i>Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin</i>	<i>Persen</i>	<i>95</i>		<i>95</i>						<i>Dinas Kesehatan</i>
			<i>Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.(SDG's)</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>		<i>100</i>						<i>Dinas Kesehatan</i>
			<i>Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)</i>	<i>Persen</i>	<i>90</i>		<i>60</i>		<i>228 kasus</i>		<i>5,18</i>		<i>Dinas Kesehatan</i>
			<i>Persentase cakupan penemuan & pengobatan kasus TBC</i>	<i>Persen</i>	<i>90</i>		<i>90</i>		<i>#####</i>		<i>23,60</i>		<i>Dinas Kesehatan</i>
			<i>Persentase kabupaten/ kota yang mencapai API < 1/1000</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		<i>10 kab</i>		<i>100,00</i>		<i>Dinas Kesehatan</i>
			<i>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat</i>	<i>Persen</i>	<i>90</i>		<i>90</i>		<i>58 kasus</i>		<i>94,00</i>		<i>Dinas Kesehatan</i>

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Persentase pengobatan penyakit menular pada balita	Persen	90		90						Dinas Kesehatan
			Persentase skrining penyakit menular pada kelompok berisiko	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan	Persen	90		61						Dinas Kesehatan
			Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko PTM	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/ wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/ wabah	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB provinsi	Persen	100		100						Dinas Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Masyarakat Miskin melalui PPI-JK oleh Pemerintah	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi	Persen	60,1		54						Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dengan capaian penilaian Indikator Nasional Mutu > 81	Persen	90		80						Dinas Kesehatan
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persen	97		97						Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	100	1.338.840.800	80	1.106.480.000		-		-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat	Persen	97	158.753.073	90	131.200.887		-		-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Persen	95	1.343.100.000	80	1.110.000.000		98.702.290		17,11	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	point	70-75		68,5		NA		NA		

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
	Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Persentase kota kreatif	%	30			30		NA		NA		
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	point	>60			54-60		NA		NA		
		Persentase penanganan konflik SARA	%	100			100		NA		NA		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	25	1.882.500.000		20	1.343.000.000	11	29.310.300	57,00	3,24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	Persen	55,67	1.545.750.000		43,3	1.425.000.000	32,89	17.706.800	57,22	2,68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Persen	4	3.675.000.000		4	2.200.000.000	2,85	52.352.180	71,14	2,85	Dinas Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat regional, nasional dan internasional	Persen	5	14.766.245.181		5	46.500.000.000	30,02	9.069.592.340		30,02	Dinas Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persen	100	4.496.125.000		100	6.950.000.000	30,00	200.000.000	30,00	19,23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	Persen	100	197.000.000		100	197.000.000	13,00	-	13,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	Persen	100	2.024.985.600		100	2.024.985.600	30	-	30	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Terselamatkan	Persen	100	50.000.000	100	50.000.000					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berkompeten	Orang	200	2.147.750.000	200	1.775.000.000					Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan terhadap Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada daerah rawan konflik	Persen	10	562.456.541	10	457.500.000	2	125.312.460	1.670,15	16,70	Bakesbangpoldagri
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol yang melakukan kaderisasi kepengurusan partai politik	Persen	100	33.671.239.086	80	4.653.634.000	-	146.322.861	-	0,09	Bakesbangpoldagri
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	Persen	70	1.600.137.061	60	488.819.000	0	47.217.480	15,56	6,46	Bakesbangpoldagri
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	Persen	77,5	848.629.511	75	730.272.000	2	14.020.000	46,53	1,99	Bakesbangpoldagri
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial	Persen	11,43	3.191.596.561	10	3.328.089.000	15	860.763.500	515,38	26,21	Bakesbangpoldagri

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Level	Optimalisasi	681.153.001	Kolaborasi	1.044.768.209		17.297.616		4,893	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
III	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	79,65		75,34		NA		NA		
	4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,82		19,7		NA		NA		
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	point	106,83		113,08		NA		NA		
			Bauran energi baru terbarukan	%	25		20,99		NA		NA		
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	Persen	35,69	2.561.000.000	32,83	2.290.000.000		2.780.000,00	36,21	36,21	Dinas ESDM
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	Persen	100	14.362.680.480	100	12.260.479.736	-	42.337.924	-	3,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kawasan hutan yang dikelola	Persen	100	92.088.114.454	100	79.839.403.170	21,58	205.282.751	21,58	21,58	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	Usaha/ Kegiatan	30	1.426.536.475	30	1.178.947.500	9	5.490.000	30,00	14,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	20	99.824.867	20	82.499.890	4	4.640.000	20,00	12,28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	65,51			65,56		NA		NA		
		Indeks Kualitas Air	point	47,9			45,71		NA		NA		
		Indeks Kualitas Udara	point	<50			75-89		NA		NA		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				198.003.892.715		205.267.611.500		379.998.000	21,77	22,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				26.981.207.000		13.690.000.000		99.850.000	0,42	0,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				7.350.000.000		11.405.000.000					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2.025.837.000		2.000.000.000					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				22.875.000.000		21.225.000.000		4.949.585.000		36,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	Persen	100	1.116.820.778	100	1.027.124.610					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	Unit Usaha	210	110.984.000	210	100.400.000					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Persen	100	717.933.653	100	593.126.160	45,83	38.237.787,00	45,83	18,74	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas sekolah peduli lingkungan	Persen	40	299.549.643	20	264.917.060	15,15	2.878.000	15,15	15,15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	Lokasi	10	1.543.862.687	10	1.275.919.575	10	22.223.245	-	44,45	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
IV	TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI		Angka kemiskinan	%	<9		<10		12,91		70,9		
			Prevalensi Stunting	%	<10		14		12,44		111,14		
			Gini rasio	angka	0,358		0,366		0,361		101,37		
	6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniyah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	point	73,65		68,73		NA		NA		
			Indeks Ketahanan Pangan	point	79,67		77,67		NA		NA		
			Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Baik		Baik		NA		NA		
			Indeks Demokrasi	point	78,75		77,47		NA		NA		

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persen	100	13.146.768.824	100	12.504.327.000	20,87	4.033.936.250	0,00	20,87	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan KPO (Korban Perdagangan Orang) dan KTK (Korban Tindak Kekerasan) tertangani	Persen	100	803.377.045	100	764.118.500	25,18	107.030.632,00	25,18	25,18	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	4,5	22.970.105.069	2,5	19.510.289.310					Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	12.712.702.446	100	12.091.472.100	11,43	1.638.200.900	11,43	11,43	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	Persen	100	2.572.056.526	100	2.446.368.100	34,45	383.061.500	34,45	34,45	Dinas Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	Persen	100	895.583.495	100	703.559.700	12,43	20.980.000	12,43	12,43	Dinas Sosial
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100	284.350.000	100	235.000.000	-	23.357.370	-	20,33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	Persen	23	2.718.350.000	21	2.390.000.000	12,43	172.125.750,00	59,19	21,79	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	Persen	23	1.461.580.228	21	1.345.365.000	16,59	157.454.800,00	72,13	24,92	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	9	510.000.000	5	410.000.000	-	13.280.000	-	1,75	DP3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perlindungan terhadap perempuan	Persen	165	370.000.000	125	352.000.000	-	14.789.800	-	2,28	DP3AP2KB
			Cakupan perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100		100						DP3AP2KB
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan Rentan yang Bekerja	Persen	100	151.000.000	85	145.000.000	-	26.015.000	-	5,20	DP3AP2KB
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak yang Mendukung Indikator Kinerja	Persen	97	30.015.696	95	28.850.150				-	DP3AP2KB
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan / pembinaan KLA	Kab/Kota	10	540.000.000	10	500.000.000	-	86.265.400		17,25	DP3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif	Persen	100	1.100.000.000	50	980.000.000	-	28.488.300	-	4,19	DP3AP2KB

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Cakupan anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100		100						DP3AP2KB
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase perangkat daerah/ Badan /Lembaga dalam pemanfaatan GDPK	Persen	100	215.086.456	100	206.734.388	-	1.500.000	100	0,68	DP3AP2KB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	Persen	100	150.000.000	100	150.000.000	100	22.619.016	100	7,54	DP3AP2KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja).	Persen	100	250.000.000	100	150.000.000		-		-	DP3AP2KB
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase Stok Cadangan Pangan Masyarakat	Persen	86,62	1.046.000.000	71,97452229	846.000.000					Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Persentase Ketersediaan Informasi Harga dan Pasokan Pangan Pokok Strategis	Persen	100	2.215.000.000	100	1.010.000.000	100,00	27.758.560,00	100,00	7,54	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Prevalensi of Undernourishment	Persen	3	1.100.000.000	2,24	600.000.000	-	30.990.000,00	-	2,75	Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Komoditi Pangan Segar yang diawasi	Persen	100	670.000.000	100	365.000.000	-	10.840.000	-	9,94	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Peningkatan Volume Usaha Simpan Pinjam	Persen	2	1.270.500.000	2	1.050.000.000					Dinas Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dinyatakan Sehat dan Cukup Sehat	Unit Usaha	103	1.512.500.000	100	1.250.000.000					Dinas Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Ditingkatkan Volume Usahanya	Unit Usaha	14	4.840.000.000	10	4.000.000.000					Dinas Koperasi dan UKM
			Jumlah Koperasi yang diukur tingkat kesehatannya	Unit Usaha	0		0						Dinas Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang ditingkatkan pengetahuan perkoperasian dan Pengetahuan UKM	Persen	80	6.050.000.000	80	5.000.000.000		392.970.500,00		23,32	Dinas Koperasi dan UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang ditingkatkan Volume Usahanya	Unit Usaha	45	3.267.000.000	45	2.700.000.000		407.100.000		21,18	Dinas Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Unggul	Usaha	50	3.963.306.600	50	3.275.460.000					Dinas Pariwisata

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persen	100	2.262.743.384	100	1.965.490.400		-	-	-	Dinas Perumahan dan Permukiman
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana alam	Persen		14.642.100.000		12.090.100.000	-	2.420.000	-	0,15	Dinas Perumahan dan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas Prasarana dalam kondisi baik	ha	85	300.733.205.000	85	228.007.996.000		34.760.000	-	0,01	Dinas Perumahan dan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	100	1.210.000.000	100	1.000.000.000			-	-	Dinas Perumahan dan Permukiman
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	Persen	40	299.549.643	20	264.917.060	15,15	2.878.000,00	15,15	15,15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi	%	2-4		2-4		2,12		100		
			Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	100		95		97,5		102,63		
			Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	65		43		36,28		84,37		

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Peningkatan Pendapatan per kapita	%	>10		8		NA		NA		
			Tingkat Literasi Keuangan	%	>67		65-67		NA		NA		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang menjalin Kemitraan dan Export	Unit Usaha	2	7.018.000.000	2	5.800.000.000		147.147.250		4,73	Dinas Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang Berwirausaha dan terfasilitasi NIB	Unit Usaha	20	2.178.000.000	20	2.250.000.000		392.970.500		23,32	Dinas Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)	RT	1000	2.246.750.000	1000	1.865.000.000		2.830.000,00	37,15	37,15	Dinas ESDM
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan (Jiwa)	Jiwa	4		4						Dinas ESDM
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase izin usaha pertambangan yang dikendalikan	Persen	11,17	719.500.000	9,5	532.500.000		2.810.000,00	28,10	28,10	Dinas ESDM
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	2-4%	1.123.000.000	2-4%	900.000.000	2,000	22.460.000,000	50,0	9,240	Dinas Perdagangan
V	TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi	point	A		BB		NA		NA		

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
	8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	kategori	A		A		NA		NA		
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	Dokumen	2	5.505.651.526	3	3.194.482.520	-	333.382.796	10	21	Bappeda
			2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	%	85		75		-				Bappeda
			3) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai	%	100		100		-				
			4) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi	unit	10		10		-				

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras	%	100		13.291.439.546	100	7.778.790.380	-	1.158.010.502	15	18	Bappeda
		2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	%	85			75		-				Bappeda
		3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang teknis yang tercapai	%	100			100		-				
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP -El per-satuan penduduk	Persen	96,4		694.282.840	96,2	573.026.000	99,29	4.857.000,00	103,21	10,55	DPMDESDUKCAPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Di Bidang Catatan Sipil	Persen	100		417.955.220	100	344.656.000	97,52	-	97,52	-	DPMDESDUKCAPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persen	100		1.644.507.702	100	1.347.896.910		-	-	-	DPMDESDUKCAPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis data yang tersaji	Persen	100		133.100.000	100	110.000.000		-	-	-	DPMDESDUKCAPIL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan dan Layanan Umum	Persen	100		132.210.733.215	100	134.210.733.215	26,2	27.259.317.991,0	32,7	29,4	Biro Umum

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan dan Layanan Umum	Persen	100	9.014.800.235	100	7.834.712.050	1,0	1.575.690.232,0	20,9	20,9	Biro Administrasi Pimpinan
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Cakupan pelaksanaan program penataan organisasi	Persen	100	841.507.316	100	754.623.796					Biro Organisasi
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persen	100	1.086.629.423	100	1.070.374.140					Biro Hukum
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	Persen	100	740.673.970	100	652.211.846					Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	Persen	100	57.176.696.303	100	44.808.181.644					Biro Kesejahteraan Rakyat
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase bahan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	Persen	100	3.894.903.000	100	2.641.346.000	100	98.050.900	100	3,04	Biro Perekonomian
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Persen		484.000.000		400.000.000					Biro Administrasi Pembangunan
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Persen	80	6.322.968.000	75	5.208.676.000	82	130.600.000	110	5,32	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	43.390.706.827	100	49.120.214.981	100,00	#####	100,00	40,66	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan waktu Penetapan APBD/APBDP dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persen	100	1.501.830.316.707	100	1.314.001.729.449		352.312.443.691		29,65	BPKAD
			Meningkatnya Ketepatan Waktu Evaluasi Rancangan APBD/APBDP dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/APBDP Kab/Kota	Persen	100		100						BPKAD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan BMD pada PD yang Akurat dan Akuntabel	Persen	79	4.236.341.947	75	3.674.744.220		417.406.925		15,72	BPKAD
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Penerapan Merit Sistem	Nilai	369.5	3.260.950.000	301.5	2.695.000.000	-	307.484.000	-	32,44	Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan	Persen	13,8		13,4						Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik	Persen	25,2		23,6						Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase Aspek Disiplin ASN	Persen	4,99		4,98						Badan Kepegawaian Daerah

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	Poin	0,32	3.286.464.591	0,29	4.682.473.127	11	444.561.180	110,00	23,77	BPSDM
			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	Poin	0,32		0,29		6		300,00		BPSDM
			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	Poin	0,32		0,29		5		29,41		BPSDM
			Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	Persen	0,32		0,29		-		-		BPSDM
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII	Orang	44000	2.595.530.030	43000	2.592.190.030	17.102	369.480.000	39,77	34,83	Badan Penghubung
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu	Persen	6	14.643.741.738	4	12.102.265.899		44.640.000	-	74	Inspektorat
			Persentase Permintaan ADTT oleh APH yang Ditindaklanjuti	Pengaduan	90		80				-		Inspektorat
			Persentase Nilai MCP di Atas Rata - Rata Nasional	Persen	86		82				-		Inspektorat
			Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu (60 hari)	Persen	60		60			104.765.000	-	10	Inspektorat
			Persentase PD yang Menyelesaikan Tindaklanjuti Rekomendasi >50%	Persen	90,5		89				-		Inspektorat

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Persentase Rata-Rata Penyelesaian Tindakanlanjutan Temuan BPK Diatas Rata-Rata Nasional	Persen	82		80				-		Inspektorat
			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi	Persen	90		70			-	-	-	Inspektorat
			Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A - AA.	Persen	55,55		44,44			37.485.000,00	-	23,36	Inspektorat
			Persentase Kehandalan Capaian IKK Perangkat Dalam LPPD	Persen	100		100			19.980.000	-	100	Inspektorat
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Badan Publik yang Informatif	Persen	50.37	6.615.452.050	42.96	6.752.481.299		708.884.459		12,31	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			Persentase Layanan yang Terintegrasi	Persen	12.03	231.796.290	8.22	222.795.357					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	Persen	90	231.796.290	70	222.795.357		44.050.100		29,37	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Indeks Keamanan Informasi	Persen	455	198.161.718	286	190.466.857		27.464.500		18,31	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	point	Tinggi		Sedang		NA		NA		
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				90	4.749.035.920	70	3.756.506.700					Dinas Perindustrian
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				1,1	1.543.049.375	1,02	1.099.750.000		-			Dinas Perindustrian
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Proporsi Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	54,66	212.390.000	52,82	204.150.000					Bappenda
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	Persen	48,5	6.821.900.000	50,34	6.805.340.000					Bappenda
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu	Persen	6	10.911.441.200	4	9.017.720.000		120.713.000	85	418.000.000	90
			Persentase Nilai MCP di Atas Rata - Rata Nasional	Persen	86		82			51.926.000	84	275.000.000	86
			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi	Persen	90		70			35.970.000,0	-	29,6	
			Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu	Persen	85		75			89.348.749,0	-	4,9	

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Persentase Peningkatan Level Masing - Masing Elemen Kapabilitas APIP	Persen	0,05		0,01			56.785.90 0,0	-	30,1	
			Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A - AA.	Persen	55,55		44,44			19.845.00 0,00	-	49,61	
			Persentase PD yang Menerepkan ZI Menuju WBK/ WBBBM	Persen	62,5		62,5			12.600.00 0,00	-	15,35	
			Persentase Perangkat Daerah yang Meningkatkan Nilai PMPRB	Persen	55		55			26.940.00 0,00	-	26,96	
VI	TERWUJUDNYA PENINGKATAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)		Persentase Capaian Indikator SDGs	%	76		63		NA		NA		
	10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	80		65		NA		NA		
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	75		60		NA		NA		
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	72		67		NA		NA		
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	75		60		NA		NA		
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Persentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Persen	10,04	4.155.000.000	7,88	3.955.000.000		720.000,0 0	9,38	9,38	Dinas ESDM

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persen	100		100			27413450,00	31,20	31,20	Dinas ESDM
VII	TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH		Indeks Daya Saing Daerah	point	3,51		3,35		NA		NA		
	11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	point	85		77		NA		NA		
		PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	persentase Kawasan Baru Transmigrasi	Persen	100	160.000.000	100	160.000.000	-	-			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	Persen	100	397.500.000	100	357.500.000	-	2.771.250	100	1,58	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Persen	100	725.000.000	100	725.000.000	-	-			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana alam			30.115.000.000		30.115.000.000	-	2.420.000,00	-	0,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				54.915.000.000		54.915.000.000		557.742.600,00	0,74	0,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				3.800.000.000		4.700.000.000		480.000,00	0,02	0,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				462.584.626.000		478.625.167.290		5.553.193.698,00	11,88	11,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Peningkatan Iklim Investasi	Persen	10	964.261.558	10	796.910.378		19.920.000		8,14	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	90	1.397.585.681	80	1.155.029.489		20.266.890		13,51	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian layanan perizinan dan non perizinan	Persen	93	1.038.573.759	93	858.325.420		5.826.200		29,52	DPMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang taat LKPM	Persen	60	1.436.964.887	60	1.187.574.287		61.205.000		8,17	DPMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	227.637.328	100	188.130.023					DPMPTSP
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang	Lokasi	2	5.026.256.477	2	4.153.930.973					Dinas Pariwisata
	12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio konektivitas	%	96		94		93,14		99,09		

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen	100	9.097.731.552	100	6.879.192.100	100	398.799.280	40,52	14,92	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Persen	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Keselamatan Transportasi	Indeks	361,99	89.135.335.833	356,35	21.988.453.500				-	Dinas Perhubungan
			Tingkat Pengembangan Infrastruktur Terminal	Persen	25		25						Dinas Perhubungan
			Kualitas Layanan Angkutan Umum	Persen	100		90,91						Dinas Perhubungan
			Kepatuhan Legalitas Operasional Angkutan	Persen	44,31		40,39						Dinas Perhubungan
	13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	point	80		78		NA		NA		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	Persen	100	4.494.943.331	100	4.094.275.300	6,85	115.585.065,00	6,85	5,58	BPBD

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Peningkatan Nilai SPM	Persen	100	1.665.878.750	100	1.491.500.000	100,00	73.636.728,00	100,00	73,64	BPBD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	100	2.268.750.000	100	1.875.000.000	-		-	-	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	Persen	9	3.100.000.000	5	2.500.000.000	-		-	-	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	Persen	100	3.823.600.000	100	3.160.000.000	30,00	23.234.943,00	30,00	6,64	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen		69.254.273.036		47.188.134.400					BRIDA

3.5 Evaluasi terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah

A. CATATAN UMUM

1. Terdapat beberapa perangkat daerah yang kesulitan untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 kedalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah diantaranya DMPD Dukcapil, DP3AP2KB, DISPORA, Badan Penghubung, Diskop UKM, Bakesbangpol, Satpol PP, Diskominfotik
2. Dalam RKPD 2024 terdapat 288 Program, 590 kegiatan, dan 2179 sub kegiatan yang tidak mendapat alokasi dalam APBD 12 Program, 61 Kegiatan, dan 377 Sub Kegiatan.
3. Hampir semua perangkat daerah belum menyusun program/kegiatan prioritas sesuai kebutuhan untuk mencapai target-target perangkat daerah dan pemerintah daerah
4. Hampir semua perangkat daerah belum menyesuaikan target IKU dan program/kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran pada DPA
5. Belum semua perangkat daerah merumuskan indikator program dan kegiatan dengan benar
6. Belum semua perangkat daerah memiliki kegiatan untuk verifikasi dan validasi calon penerima hibah
7. Hampir semua perangkat daerah belum dapat merumuskan pencapaian kinerja bulanan yang inline dengan rencana aksi pada e-kinerja
8. Kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD terkendala kelengkapan administrasi
9. Belum semua pekerjaan memasuki tahap tender yang diakibat dari keterlambatan perangkat daerah melengkapi admistrasi/dokumen tender
10. Mutasi Pejabat Pembuat Komitmen berakibat pada keterlambatan penyiapan dokumen tender
11. Mutasi personil yang menangani pelaporan berakibat pada keterlambatan penyusunan laporan progress Renja Triwulan I
12. Diperlukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporannya
13. Selama belum diatur melalui Permendagri, maka perlu diatur tentang menu kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan SOP-nya. Dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Petunjuk Pelaksanaan
14. Terdapat potensi pendanaan yang bersumber dari dana BLUD yang tidak dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat daerah pengelola BLUD

B. HASIL EVALUASI PER PERANGKAT DAERAH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

Tujuan OPD: Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat

Sasaran OPD Terwujudnya Tertib Arsip dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Daerah NTB

Adapun rumusan tujuan dan sasaran tersebut telah mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 pada tujuan kedua dan sasaran kedua yaitu Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA berkurang pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 930 juta dari 15,55 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 14,62 Miliar dalam DPA
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 30,0%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 28,61%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Dukungan anggaran untuk mendukung perpustakaan mobile ke desa sangat kecil sementara target kinerja 20% desa se NTB, termasuk untuk penyelamatan arsip statis
- Jumlah arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah hanya 4 orang saja, tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kewajiban OPD untuk melaporkan jumlah arsip dinamis yang dihasilkan setiap tahun sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan tidak semua perangkat daerah memiliki arsiparis
- Dari 35 kendaraan operasional, hanya 4 unit yang bisa digunakan

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Berdasarkan indikator Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan seharusnya dapat dilaporkan tidak hanya per triwulan tetapi juga per bulan
- Supaya besar kontribusinya dalam pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat seharusnya target kunjungan ke perpustakaan dihitung tidak hanya ke Perpustakaan Provinsi saja, tetapi ke semua Perpustakaan se NTB termasuk melalui dukungan Perpustakaan Mobile ke desa-desa
- Untuk mendukung pencapaian target kinerja semestinya harus berkolaborasi dengan Kabupaten/Kota

- Perlu dilakukan advokasi kepada seluruh perangkat daerah untuk pengelolaan arsip, termasuk kebutuhan minimal atas sarana dan prasarana, serta personil arsiparis
- Perlu kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menambah koleksi buku perpustakaan, karena pengadaan buku di sekolah-sekolah sudah cukup banyak
- Perlu dilakukan kerjasama dengan Museum Daerah (UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB) terkait dengan arsip naskah kuno
- Untuk meningkatkan literasi masyarakat, bisa membangun kerjasama dengan para pihak misalnya melalui program KKN

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum menghitung tambahan anggaran di perubahan tetapi akan mengusulkan pada perubahan terutama untuk mendukung pelayanan perpustakaan dan perpustakaan mobile sebagai indikator kinerja utama dinas

DINAS PMPTSP

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

Perangkat daerah kesulitan dalam mengidentifikasi tujuan dan sasaran RPD yang akan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah. Apakah meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah atau meningkatnya daya saing daerah?

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 211 juta dari 9,48 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 9,69 Miliar dalam DPA, dengan proporsi 82,10% (7,99 Miliar) untuk belanja Penunjang urusan, sedangkan 17,90% (1,74 Miliar) untuk belanja Program Prioritas
- 3. Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 36,03%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 9,48%

4. Permasalahan dan Kendala OPD

- Belum ada pemetaan Kawasan-kawasan strategis yang akan ditawarkan ke investor karena Perda RTRW baru ditetapkan
- Belum tersedianya RDTR Kawasan strategis sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan infrastruktur penunjangnya

5. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Sesuai arahan RPD Provinsi NTB, dinas DPMPTSP perlu mendorong dan mempromosikan kegiatan investasi pada Kawasan-kawasan strategis di Provinsi NTB
- Dalam menghitung realisasi nilai investasi perlu dipilih investasi yang dilakukan oleh investor yang sudah ada dengan hanya menambahkan modal dari investasi yang sudah ada dan investor baru supaya dapat diketahui seberapa banyak investor baru yang masuk ke NTB
- Dengan ditetapkan RTRW Provinsi NTB yang baru, Dinas DPMPTSP perlu menyiapkan langkah strategis diantaranya perlu dimasukkan dalam rencana kerja dalam menyiapkan penyusunan dokumen *Investment Project Ready to Offer (IPRO)* yang berskala internasional dan berbasis pada kebutuhan penanaman modal terutama pada Kawasan-kawasan strategis di provinsi NTB.
- Untuk sasaran strategis Dinas, tidak hanya tentang investasi saja tetapi juga perlu ditambahkan terkait pelayanan perizinan satu pintu sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik
- Harus ada pemetaan infrastruktur dasar (jalan, listrik, dan air) yang mendukung daya tarik potensi investasi yang ditawarkan.

6. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

BPBD

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

Rumusan tujuan dan sasaran BPBD telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yang ketiga yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri dengan sasaran Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana dan indikator kinerja Indeks Risiko Bencana

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran renja berkurang pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 6,5 Miliar dari 19,0 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 12,49 Miliar dalam DPA dengan proporsi 82,63% (10,32 Miliar) untuk Program penunjang dan 19,37% (2,17 miliar) untuk program prioritas
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Badan sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 23,49%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 27,65%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Untuk menurunkan indeks risiko bencana yang dapat diintervensi oleh daerah yaitu peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Dalam peningkatan kapasitas tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan daerah
- Yang bisa diintervensi oleh daerah dengan meningkatkan ketahanan daerah, sedangkan yang terkait kesiapsiagaan belum dapat dihitung bahkan BNPB belum memasukan kesiapsiagaan dalam rilisnya tentang indeks risiko bencana.
- Untuk ketahanan daerah dalam penanggulangan daerah sebagian besar merupakan kewenangan kabupaten/kota, sementara provinsi hanya sebagian kecil.
- Jumlah desa/kelurahan Tangguh bencana yang ditargetkan terlalu tinggi dan tidak didukung oleh anggaran yang cukup.

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Untuk mendukung pencapaian Indeks Risiko Bencana di NTB, BPBD perlu mendorong BPBD Kabupaten/Kota untuk memasukan indeks ketahanan daerah sebagai sebagai sasaran strategis semua BPBD di Kabupaten/Kota
- Perlu diidentifikasi indikator mana saja dalam 7 prioritas ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dari skor terakhir telah mencapai 0,70 sampai tahun 2023, sehingga itu yang seharusnya masuk dalam rencana kerja BPBD baik di tahun 2024 maupun tahun 2025.
- Perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan Kabupaten/Kota supaya dapat Bersama-sama menciptakan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
- Perlu ditiru pengalaman tahun 2023 dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi melalui KKN Tematik dalam mendorong pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, sehingga tidak bergantung pada dana APBD saja. Tahun 2023 lebih 200 Desa/Kelurahan menjadi DESTANA.

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Perlu tambahan anggaran untuk program DESTANA karena target yang dibebankan cukup besar

DISKOP UKM

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

Kesulitan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran RPD yang akan dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran perangkat Diskop UKM, apakah di sasaran meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah dengan indikator produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor atau produktivitas sub sektor UMKM yang secara spesifik belum dihitung oleh BPS

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 429,77 juta dari 24,46 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 24,89 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 17,7221,24%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan belum dilaporkan

3. Permasalahan dan Kendala OPD

Jumlah personil sesuai kebutuhan masih kurang

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Sesuai dengan Indikator Kinerja RPD, Dinas Koperasi menempatkan Pertumbuhan produktivitas KUKM sebagai tujuan perangkat daerah, dengan sasaran mendorong UKM naik kelas, terus meningkatkan perkembangan start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan serta pengembangan Koperasi menjadi Koperasi Modern
- Perlu segera berkoordinasi dengan BPS untuk membantu menghitung nilai PDRB sub Sektor KUKM, sehingga dapat menghitung berapa kontribusi KUKM dalam PDRB NTB serta pertumbuhannya setiap tahun

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DISNAKERTRANS

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

Kesulitan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran RPD yang akan dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran perangkat daerah, apakah di sasaran meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah di tujuan dan sasaran pertama di RPD dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau pada tujuan keempat dengan tujuan Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri dan sasaran Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik), dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan?

Rumusan tujuan Dinas Tenaga Kerja yaitu Meningkatnya pemberdayaan dan pendayagunaan angkatan kerja dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan 3 sasaran yaitu Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat, Meningkatnya pengembangan satuan permukiman transmigran,

dan Meningkatnya penerimaan Retribusi melalui pelayanan K3 dan Rencana Penggunaan TKA

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- a. Alokasi anggaran RENJA berkurang pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 10,16 Miliar dari 36,88 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 26,42 Miliar dalam DPA.
- b. Capaian Tujuan perangkat daerah secara rata-rata sebesar 28,84% sedangkan capaian Sasaran perangkat daerah sebesar 58,35%.
- c. Capaian Program Prioritas sebesar 9,12%. Rendahnya capaian program karena program yang telah dilaksanakan yang dominan di program penunjang urusan, sementara program lainnya belum dapat diukur dan direncanakan pada triwulan berikutnya
- d. Progress realisasi anggaran telah mencapai 33,61%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

Untuk melaksanakan urusan transmigrasi tidak didukung oleh anggaran yang cukup, hal ini dapat dilihat pada alokasi program terkait ketransmigrasian hanya dialokasikan sebesar Rp.9.000 pada 2 program yaitu Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Perlu dilakukan pendalaman atas kewajiban perusahaan untuk perlindungan tenaga kerja, agar Dinas dapat memetakan besaran target PAD.
- Susun program/kegiatan berdasarkan skala prioritas, kriteria ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan, dan hal terkait lainnya.

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DINAS PERHUBUNGAN

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

Rumusan tujuan dan sasaran Dishub telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yang ketujuh yaitu Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah dengan sasaran Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional, namun masih harus disempurnakan karena karena tujuan dan sasaran perangkat daerah sama.

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 238,1 juta dari 11,39 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 11,63 Miliar dalam DPA.

- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 17,72%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 26,28%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Untuk mewujudkan konektivitas transportasi publik, sudah dibukakan rute trayeknya tetapi armada transportasi yang tidak tersedia
- Sering terjadi armada transportasi tersedia tetapi penumpang tidak ada karena sudah beralih ke transportasi sendiri seperti mobil pribadi, motor atau ojek

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Perlu dibuatkan secara berjenjang mulai tujuan dan sasaran perangkat daerah sampai ke level program, kegiatan dan sub kegiatan
- Dalam perencanaan, harus dapat menjelaskan konektivitas angkutan laut dan darat eksisting dan yang belum dan dimana titik-titik yang rawan kecelakaan, kelengkapan jalan yang masih kurang, dan hal terkait lainnya
- Upaya koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan jembatan timbang. Ini penting untuk menjaga tonase kendaraan yang boleh atau tidak melintas di jalan. Begitu pula upaya dengan Kepolisian terkait dengan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

BRIDA

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

Rumusan tujuan dan sasaran BRIDA belum mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yang ketujuh yaitu Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah dengan sasaran Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 624,29 juta dari 21,05 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 21,67 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 17,72%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 26,28%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi sangat minim, dari total alokasi anggaran yang ada 93,53% untuk program penunjang dan beasiswa
- Pemanfaatan teknologi dan inovasi belum maksimal.
- Belum jelasnya mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) bagi daerah
- Perlu adanya dukungan Regulasi Komprehensif

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- BRIDA dapat mengambil mengacu pada 2 tujuan dan Sasaran RPD sebagai dasar perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Unggul, Andal Dan Taqwa (KUAT) dengan sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat (terkait Beasiswa) karena Beasiswa untuk Perguruan Tinggi dapat mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah dan tujuan RPD TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH dengan sasaran Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor.
- Perlu berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan untuk memetakan bentuk riset dan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja industri dan pengembangan ekspor, dan Bidang ekonomi akan memfasilitasi untuk pembahasannya
- Rumusan program/kegiatan harus didasarkan atas fungsi BRIDA sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam melaksanakan pengembangan riset dan inovasi, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pihak-pihak terkait.
- Evaluasi atas mesin-mesin yang sudah diproduksi, sejauh mana efektivitas dan efisiensinya.

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

RUMAH SAKIT

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Rumusan tujuan dan Sasaran semua Rumah Sakit (RSUP, RSJ Mutiara Sukma, RSUD Manambai, RS Mata, dan RS Mandalika) mengacu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan denganyang telah dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran RPD yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Unggul, Andal Dan Taqwa (KUAT) dengan sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat (terkait Beasiswa) terkait Pemenuhan SPM Rumah Sakit sesuai aturan Permenkes.
- Rumusan tujuan dan Sasaran semua Rumah Sakit belum mengacu pada tujuan dan sasaran Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Daerah dengan sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, karena rumah sakit melaksanakan pelayanan publik

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA dan DPA Rumah Sakit sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH	PAGU RENJA	PAGU DPA	Bertambah/ Berkurang
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	605.588.000.000	555.472.679.757	- 50.115.320.243
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	61.056.056.110	60.533.806.935	-522.249.175
Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	122.549.000.000	115.867.824.791	-6.681.175.209
Rumah Sakit Mandalika	64.292.942.665	64.015.976.730	-276.965.935
Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	38.868.921.396	39.139.769.120	270.847.724

- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama semua Rumah Sakit sampai bulan mei secara rata-rata sebesar 13,61%, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 25,51%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 31,60%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- RSUP hanya mendapat alokasi anggaran dari APBD untuk pembayaran listrik hanya cukup 8 bulan
- RSUP secara spesifik belum mendapatkan petunjuk terkait penyusunan Renstra dengan berubahnya status RSUP menjadi eselon II a, Resntra yang ada disusun berdasarkan tujuan dan sasaran strategis DINas Kesehatan
- RSUP: Pendapatan tidak mencapai target, sehingga perlu intervensi dari Pemda untuk pembayaran hutang kepada PT. SMI
- RSJ Mutiara Sukma, RSUD Manambai, RS Mata, dan RS Mandalika relatif tidak mendapatkan kendala dalam pelaksanaan rencana kerja.
- Terdapat beberapa kebijakan yang menghambat pelaksanaan program kegiatan seperti Kebijakan BPJS Kesehatan tentang sistem rujukan online berjenjang yang mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dan pengurangan dana anggaran (DBHCHT dan DAK)

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Untuk RSUP perlu dikonsultasikan dengan Biro Organisasi, secara kelembagaan kedudukannya sudah setara kepala Dinas untuk posisi direktur

atau eselon II a, dan wakil direktur eselon II b, sementara renstranya masih disusun sebagai UPTD dinas Kesehatan

- Perlu menambah tujuan dan sasaran di renstra rumah sakit yang terkait pelayanan publik sebagai salah indikator reformasi birokrasi karena rumah sakit melaksanakan pelayanan publik
- Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang telah ditetapkan dalam Renjanya tetapi tidak mendapat alokasi dalam APBD/DPA, namun dapat direalisasikan dengan menggunakan Dana BLUD. Untuk itu perlu disusun Renja Rumah Sakit berdasarkan sumber pendanaan termasuk menggunakan Dana BLUD, karena Dana BLUD bagian dari APBD. Penggunaan Dana BLUD tidak ditempatkan pada satu item kegiatan saja, tetapi perlu disebar untuk mendukung kegiatan-kegiatan penunjang BLUD lainnya sesuai Renja OPD.
- Penyakit-penyakit utama yang menjadi sebab kesehatan di suatu daerah atau khusus mata, menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan pengobatan (obat, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain).
- Pembangunan gedung baru harus disertai dengan pengadaan peralatan/perlengkapan termasuk kesiapan tenaga medisnya, agar ketika sudah selesai dibangun dapat langsung digunakan/operasional. Oleh sebab itu, harus diperhitungkan kelayakannya sejak awal.
- Rumusan program/kegiatan harus didasarkan atas kebutuhan, misalnya penyakit jiwa jenis apa yang paling dominan, maka obat-obatan, tenaga medis, dan bentuk aktivitas harus mampu menjawab permasalahan ini

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Perubahan target pendapatan BLUD, karena progres sampai bulan mei melampaui target pada RSJ Mutiara Sukma dan RSUD Manambai
- Tambahan untuk bayar listrik pada RSUP
- Pergeseran untuk kebutuhan pembiayaan listrik di RS Manambai

SEKRETARIAT DAERAH

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Rumusan tujuan dan sasaran Sekretariat daerah belum mengacu semua sasaran RPD terutama pada rekomendasi kebijakan dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah, karena tujuan pembangunan daerah telah dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama Gubernur/Pemerintah Daerah
- Dalam Renstra Sekretariat Daerah belum mencantumkan Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah, Staf ahli dan Para Asisten, yang sudah ada Indikator Kinerja Utama Para Kepala Biro
- Indikator yang terkait kerja sama daerah difokuskan pada kerja sama yang mendukung pencapaian target-target pembangunan saja

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA dan DPA pada sekretariat daerah sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH	PAGU RENJA	PAGU DPA	Bertambah/ Berkurang
Sekretariat Daerah	144.316.244.813	168.719.018.214	24.402.773.401
Biro Umum	106.359.000.000	99.042.917.750	-7.316.082.250
Biro Organisasi	1.004.481.545	866.269.900	-138.211.645
Biro Administrasi Pimpinan	9.720.499.410	7.544.816.050	-2.175.683.360
Biro Hukum	1.568.460.194	2.943.459.544	1.374.999.350
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	900.046.000	995.708.000	95.662.000
Biro Kesejahteraan Rakyat	20.196.538.270	52.526.721.040	32.330.182.770
Biro Perekonomian	1.213.484.600	1.090.520.000	-122.964.600
Biro Administrasi Pembangunan	765.973.694	760.064.830	-5.908.864
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.587.761.100	2.948.541.100	360.780.000

- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama masing-masing Biro sampai bulan mei secara rata-rata 57,17%, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 26,28%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 21,21%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Kurang didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada Biro Hukum terutama untuk menunjang fasilitasi produk hukum baik provinsi maupun kabupaten/kota yang terus meningkat
- Masih kurang pendanaan terutama untuk melayani keprotokolan pimpinan daerah pada Biro Administrasi Pimpinan
- Jumlah personil sesuai kebutuhan masih kurang
- Perangkat daerah lambat dalam penyampaian administrasi/dokumen tender
- Terdapat kegiatan dari pokok-pokok pikiran DPRD yang tertuang dalam DPA Biro Kesra dan sudah dilaksanakan, yaitu berupa bantuan material untuk pembangunan pada beberapa masjid, namun ada kemungkinan untuk dibatalkan/ditarik kembali akibat adanya perubahan lokasi/sasaran.

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Perlu menyusun tujuan dan sasaran yang disertasi indikator kinerja serta target Sekretariat daerah sebagai Indikator Kinerja Utama sekretaris daerah dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD
- Perlu dibuatkan perencanaan kinerja yang berjenjang mulai dari Indikator Kinerja Utama sekretaris daerah, diturunkan ke para asisten dan kemudian dijabarkan ke semua Kepala Biro
- Perlu mempelajari contoh renstra Sekretariat Daerah Provinsi lain yang sudah mencantumkan IKU Sekda, IKU Asisten dan IKU kepala Biro terutama

pada provinsi yang sudah mendapat SAKIP Level AA seperti Jogja, Jateng maupun Jabar, bila perlu melakukan studi komparasi

- Fungsi biro adalah menyusun rumusan kebijakan untuk disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah.
- Diperlukan evaluasi atas kerja sama yang sudah dilakukan, misalnya dengan Provinsi Jawa Barat. Ini diperlukan untuk memetakan sejauh mana kerja sama tersebut efektif dalam mencapai target-target pembangunan
- Perlu penegasan dalam bentuk surat kepada perangkat daerah menjelang akhir tahun dalam rangka pelaksanaan tender sebagaimana target-target yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur, agar tidak terjadi keterlambatan penyampaian administrasi/dokumen tender
- Kualifikasi sebagai salah satu komponen penilaian dalam indeks profesionalisme ASN. Bagaimana pemetaan jabatan eksisting dengan kebutuhan organisasi atau yang seharusnya sesuai dengan ketentuan?
- Cek kembali Peraturan Gubernur yang terkait dengan tusi Biro Ekonomi. Jika urusannya terkait kerangka ekonomi makro, maka tidak hanya mengkoordinir terkait inflasi daerah saja, namun juga dengan pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, dan sebagainya.
- Perubahan indikator kegiatan dengan komponen berupa perjalanan dinas, yang semula jumlah dokumen laporan menjadi jumlah rumusan rekomendasi yang dihasilkan. Terkait dengan permasalahan di atas, agar tetap melakukan koordinasi dengan BPKAD

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DINAS KETAHANAN PANGAN

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD pada tujuan 4 yaitu Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri dengan sasaran Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik) dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan
- Indikator ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan sebagai aspek-aspek utama penopang ketahanan pangan, telah menjadi bagian dari sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 7,71 Miliar dari 18,12 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 10,42 Miliar dalam DPA.

- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 30,34%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 16,67%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Alokasi anggaran masih kurang terutama untuk Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sesuai alokasi anggaran hanya akan dapat diadakan sebanyak 60 ton
- Untuk melakukan sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan masih dilakukan diluar daerah karena di NTB belum tersedia peralatan uji yang memadai

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Pada level perangkat daerah, perlu penyesuaian istilah Daerah rentan rawan pangan, karena cakupannya terlalu luas, sedangkan sesuai Batasan kewenangan, desa rentan pangan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, sedangkan Kecamatan Rentan Pangan menjadi kewenangan Provinsi sehingga indikator IKU OPD dari Persentase Daerah yang terkategori Rentan Rawan Pangan menjadi Persentase kecamatan yang terkategori Rentan Rawan Pangan
- Bidang Ekonomi Bappeda agar memfasilitasi antar perangkat daerah yang terkait dengan industrialisasi agar komoditas yang berpotensi ekspor (keluar daerah lingkup Indonesia atau keluar negeri) dapat dikawal kualitasnya. Misalnya tomat dan bawang merah yang memerlukan sertifikat keamanan pangan. Namun dengan catatan bahwa produksi komoditas-komoditas harus dapat mencukupi kebutuhan dalam daerah.

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DINAS PERINDUSTRIAN

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dengan sasaran meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah namun masih perlu disempurnakan karena belum mengarah pada produktivitas sektor industri pengolahan.

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 7,71 Miliar dari 18,12 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 10,42 Miliar dalam DPA.

- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan Mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 9,19%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 1,11%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Database IKM yang belum update
- Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB belum diturunkan kedalam Pergub sebagai penjabaran terhadap rencana pembangunan industri NTB
- Berbedanya pengelompokan sub sektor industri pengolahan antara BPS dengan Kementerian Industri RI sehingga mempengaruhi terhadap basis intervensi
- Kurang dukungan anggaran terutama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah levelnya masih terlalu rendah untuk kepala Dinas dan perlu mengacu pada Indikator Kinerja Daerah urusan Perindustrian sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi NTB 2024-2026 yang diharapkan dapat mendorong produktivitas industri pengolahan
- Dalam rangka meningkatkan kinerja industri, perlu berkoordinasi dengan BRIDA Provinsi NTB sesuai dengan amanat RPD Provinsi NTB diharapkan dapat mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kinerja industri.
- Bidang Ekonomi Bappeda (pak Ironi) perlu memfasilitasi untuk membahas dan memetakan basis industri yang unggul dan punya daya ungkit yang besar dalam mendorong produktivitas sektor/sub sektor industri olahan supaya lebih fokus dan sesuai dengan komoditi unggulan daerah.
- Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri, agar pembangunan industri di NTB bisa lebih terarah dan fokus

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

BAPPEDA

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Rumusan tujuan dan sasaran Bappeda baru mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yaitu Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, namun belum memasukan tujuan dan sasaran RPD terkait Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

- Tujuan dan sasaran, serta indikatornya disesuaikan, contohnya persentase program-program prioritas yang tercapai

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 9,50 Miliar dari 50,22 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 40,72 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 18,89%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 21,30%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Belum tersedianya panduan penilaian keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- Belum optimalnya pengumpulan hasil kinerja untuk pengukuran kinerja pelaksanaan renja.

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Rumusan tujuan dan sasaran serta indikatornya perlu disempurnakan
- Perlu menambah tujuan dan sasaran strategis Bappeda terkait pencapaian SDG's
- Perlu dilakukan pembahasan internal lebih lanjut

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

BKD

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

Rumusan tujuan dan sasaran BKD telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yaitu Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, dengan tujuan dan sasaran OPD yaitu Terwujudnya Profesionalisme Aparat Sipil Negara di Pemerintah Provinsi NTB

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 296,66 juta dari 16,20 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 15,91 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 36,81%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 30,64%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan program prioritas, karena dari alokasi anggaran yang ada 93,71% untuk program penunjang

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Kualifikasi sebagai salah satu komponen penilaian dalam indeks profesionalisme ASN, seperti apa kualifikasi jabatan eksisting dengan yang seharusnya? Hal ini perlu dipetakan
- Bentuk pembinaan atas penyetaraan jabatan perlu dijelaskan, misalnya terkait dengan instansi pembina, diklat yang harus diikuti, dan lain-lain

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Perlu tambahan anggaran pada perubahan Renja untuk mendukung penerapan Sistem Merit sebesar Rp. 3.546.210.000

BPKAD

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Rumusan tujuan dan sasaran OPD telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yaitu Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan sasaran Meningkatnya kemandirian fiskal daerah, dengan tujuan dan sasaran OPD yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah dan Meningkatnya kesesuaian alokasi belanja wajib

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA berkurang pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 28,19 Miliar dari 1,09 Triliun teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 1,07 Triliun Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata 17,73%, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 26,88%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 32,65%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Terkait Pembinaan ke Kabupaten/Kota, Alokasi waktu dan personil yang terbatas, tidak sebanding dengan kabupaten/kota yang ada.

- Penyusunan Standar harga molor akibat Keterlambatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah akibat Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang terlambat.
- Database Pemanfaatan aset masih manual dan belum akurat. Lokasi aset belum detail dan luasan
- aset yang dimanfaatkan masih menggunakan penghitungan/pengukuran manual
- Piutang Retribusi Pemanfaatan aset yang belum bayar/tidak tertagih. Penyewa aset tanah/bangunan yang tidak tertib administrasi

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tidak dibuat tahunan, tetapi perlu dibuat 5 tahunan sesuai dengan kebutuhan dalam rencana strategis perangkat daerah
- Perlu segera menertibkan asset-aset daerah termasuk berbasis digitalisasi

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DP3AP2KB

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Kesulitan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran RPD yang akan dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran perangkat daerah, namun dapat dijabarkan pada Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Unggul, Andal Dan Taqwa (KUAT) dengan Indikator Kinerja: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan atau pada tujuan Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri dengan indikator Indikator Kinerja: Angka kemiskinan, Prevalensi Stunting, dan Gini rasio

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 18,6 juta dari 10,78 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 10,80 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan belum disampaikan dalam laporan

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Minimnya dukungan anggaran terutama utk pencapaian sasaran strategis Dinas, alokasi yang ada 82% untuk kegiatan penunjang urusan

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Jika mengacu pada Tujuan RPD Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Unggul, Andal Dan Taqwa (KUAT), maka DP3AP2KB perlu memperjelas penekanannya seperti apa untuk meningkatkan Manusia Yang Kompetitif, Unggul, Andal Dan Taqwa
- Tidak perlu mendesain banyak tujuan perangkat daerah, mungkin dengan satu tujuan dengan banyak indikator dengan memperhatikan Indikator Kinerja Daerah dengan membuat perjenjangan, karena IKD itu tidak harus masuk semua di level eselon II, bisa eselon III dan IV tergantung perjenjangannya
- Perlu juga menyelaraskan dengan IKUnya Menteri PPA, supaya ada keselarasan dengan target kinerja nasional
- Perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Bidang P2M untuk mempertegas tujuan dan sasaran DP3AP2KB

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DISKOMINFOTIK

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Rumusan tujuan dan sasaran OPD telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yaitu Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, namun masih perlu disempurnakan karena belum spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Diskominfo.

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 7,71 Miliar dari 18,12 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 10,42 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 22,28%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 19,46%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- SDM yang menangani PPID di masing-masing OPD terbatas, sehingga pengelolaan PPID tidak optimal karena tidak menjadi tugas utama personil. Strateginya dengan mengoptimalkan fungsi pranata humas, namun tidak semua OPD memiliki personil dimaksud.

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- perlu menyempurnakan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan menurunkan tujuan dan sasaran RPD sebagai acuan dalam merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah
- Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektorial dari hasil penilaian KemenPAN RB masih dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi, dengan catatan segera menindaklanjuti rekomendasi kemenPAN RB yaitu perlu menyusun kaidah baku tentang penilaian akurasi data serta menerapkan akurasi tersebut dalam pelaksanaan kegiatan statistik sehingga dapat dilakukan reviu dan evaluasi berkala demi peningkatan kualitas data.
- Perlu mengidentifikasi hal-hal yang perlu diintervensi untuk memenuhi Indeks SPBE, sehingga perlu dialokasi dalam Renja 2024 maupun 2025

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DINAS ESDM

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Rumusan tujuan dan sasaran OPD telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yaitu Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah, Indikator Kinerja: Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang, serta Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana, Indikator Kinerja: % Bauran energi baru terbarukan, namun perlu perbaikan tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikatornya menyesuaikan tusi perangkat daerah dan bidang-bidang/UPT yang ada

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 7,71 Miliar dari 18,12 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 10,42 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 26,00%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 24,94%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Pembatasan kewenangan berakibat pada kurang optimalnya peran Dinas ESDM terhadap permasalahan pertambangan bahan galian non logas tanpa izin maupun yang berizin. Kegiatan pengawasan terhadap operasional PT. Amman Mineral merupakan kewenangan Kementerian ESDM melalui Inspektur Tambang.

- Untuk geologi belum terpetakan di IKU

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Terkait dengan aspek kegeologian, perlu diperdalam terkait dengan mitigasi bencana (rawan longsor, kekeringan), pemetaan potensi bahan galian sebagai dasar untuk investasi sektor pertambangan, dan lain-lain

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DPMPD DUKCAPIL

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Kesulitan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran RPD yang akan dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran perangkat daerah

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA berkurang pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 1,21 Miliar dari 18,04 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 16,83 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 32,71%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 36,81%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Administrasi kependudukan yang ditangani harus spesifik, apakah akta kelahiran/kematian, akta nikah, KTP, dan lain-lain, sehingga sasaran dan targetnya terukur

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Usulan pada perubahan sebesar 512,96 juta untuk Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional, dan Pembuatan Pagar Gedung kantor, Pemeliharaan ruang kerja dan Kamar Mandi

SATPOL PP

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Kesulitan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran RPD yang akan dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran perangkat daerah

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 193,26 juta dari 20,93 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 21,12 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 37,89%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 43,63%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Alokasi anggaran dari DBHCHT cukup besar namun tidak menunjang tugas utama Satpol PP

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Perlu dilakukan pertemuan berkala dengan Satpol PP Kabupaten/Kota untuk mengukur sejauh mana implementasi penegakan Peraturan Daerah di tiap-tiap wilayah
- Upaya penertiban atas alih fungsi lahan yang sangat marak terjadi yang berpotensi pada pelanggaran tata ruang belum optimal. Perlu dilakukan upaya-upaya lanjutan terkait hal ini.

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

BPSDM

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Rumusan tujuan dan sasaran OPD telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yaitu Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, dengan tujuan dan sasaran OPD yaitu Terwujudnya Profesionalisme Aparat Sipil Negara di Pemerintah Provinsi NTB

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA berkurang pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 500,02 juta dari 21,97 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 21,47 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 28,34%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 26,96%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- BPSDM menjadi lembaga yang terakreditasi A dalam penyelenggaraan Pelatihan Latsar, namun kegiatan-kegiatan yang ada belum optimal untuk mempertahankan akreditasi ini

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Dipetakan mana kegiatan prioritas sesuai dengan kriteria-kriteria penting, serius, berdampak dan kriteria lain yang relevan. Ini penting di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
- Surat permohonan penambahan anggaran ditujukan kepada Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Usulan pada perubahan sebesar 1,74 miliar untuk Orientasi P3K Provinsi Tahap 2, Diklat BMD, orasi ilmiah 3 Widyaiswara, serta Biaya orientasi Kegiatan S2 (tercantum dalam MOU dan PKSO)

INSPEKTORAT

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Rumusan tujuan dan sasaran BKD telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yaitu Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA berkurang pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 5,53 Miliar dari 42,25 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 36,73 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata 40,0%, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 24,41%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 15,43%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Untuk pemetaan program/kegiatan yang beresiko, kendala pada perangkat daerah yang tidak terbuka dalam menentukan program/kegiatan yang beresiko

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Perlu dipetakan perangkat daerah mana yang memiliki temuan berulang. Ini yang perlu mendapat pembinaan saat pelaksanaan program/kegiatan.
- Perlu dipetakan terkait pemanfaatan aset yang belum optimal untuk diberikan rekomendasi, misalnya optimalisasi sewa rumah dinas, lahan-

lahan, maupun terhadap aset yang sudah termanfaatkan sebagai kantor namun lebih optimal jika dimanfaatkan dari aspek ekonomi.

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DINAS PERDAGANGAN

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Rumusan tujuan dan sasaran OPD telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yaitu Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah, Indikator Kinerja: Produktivitas sektor perdagangan

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA berkurang pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 931,70 juta dari 17,07 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 16,14 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 23,78%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 15,51%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Komoditas yang menjadi penyebab inflasi daerah bukan hanya dari sektor pertanian seperti cabai merah dan bawang merah. Sehingga perlu dilakukan koordinasi level pemerintah daerah.

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Perlu dilakukan analisis pasar untuk peluang ekspor. Komoditas yang menjadi kebutuhan Negara lain, maka produksinya yang kita tingkatkan.
- Bidang Ekonomi Bappeda agar dapat memfasilitasi integrasi program/kegiatan mulai dari OPD hulu sampai hilir, agar industrialisasi dapat optimal.
- Sesuai amanat RPD, untuk pengembangan ekspor perlu sentuhan inovasi, untuk itu perlu duduk Bersama dengan BRIDA agar dapat mengidentifikasi jenis inovasi yang perlu dikembangkan yang dapat meningkatkan ekspor

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Rumusan tujuan dan sasaran OPD telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yaitu Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah, Indikator Kinerja: Produktivitas sub sektor Perikanan

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA berkurang pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 30,39 juta dari 60,93 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 60,90 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 15,11%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 29,90%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Perlu fasilitasi untuk optimalisasi BLUD terkait ekowisata
- Penanganan sampah laut perlu optimalisasi peran Pokwasmas
- Terkait dengan pabrik garam di Bima, PT. GNE tidak berkenan untuk melakukan pengelolaannya

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Untuk pertanian berkelanjutan dimana kelautan dan perikanan termasuk di dalamnya, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan hasil laut
- Sumber daya hasil kelautan dan perikanan harus terintegrasi dengan komoditas orientasi ekspor yang akan dikembangkan oleh Dinas Perdagangan. Oleh sebab itu, diperlukan fasilitasi dari Bidang Ekonomi Bappeda sehubungan dengan hal ini.
- Setiap proyek/kegiatan, harus diukur di awal terkait 5 aspek: relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutannya.
- Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air harus terintegrasi dengan semua kegiatan yang akan dilakukan
-

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DLHK

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Rumusan tujuan dan sasaran OPD telah mengacu pada beberapa tujuan dan sasaran RPD yaitu Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah,

Indikator Kinerja: Produktivitas Sub sektor Kehutanan, Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana dengan Indikaotr Kinerja % Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara, Indikator Kinerja:

- a. Indeks Kualitas Air
- b. Indeks Kualitas Udara
- c. Indeks Kualitas AIr Laut
- d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Serta Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dengan indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA berkurang pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 10,16 Miliar dari 108,5 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 98,34 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 42,03%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 21,99%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Penanganan sektor kehutanan perlu mendapat atensi pimpinan. Kondisi saat ini akibat dari alih fungsi lahan tanaman hutan menjadi lahan dengan tanaman jagung adalah lahan kritis yang semakin luas, sehingga bencana banjir setiap tahun terus terjadi. Kewenangan sektor kehutanan sudah beralih dari kabupaten/kota ke Provinsi, sementara di sisi lain Pemprov tidak optimal dalam pengawasan, serta Pemkab/Pemkot seolah-olah lepas tangan atas perambahan hutan, illegal logging termasuk alih fungsi lahan yang terjadi di wilayahnya. Penanganan sektor kehutanan sangat penting karena terkait dengan sektor-sektor lain, seperti perkebunan, perikanan dan kelautan, penanggulangan bencana, dan lain-lain.

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

BADAN PENGHUBUNG

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Kesulitan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran RPD yang akan dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran perangkat daerah

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 2,0 Miliar dari 12,37 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 14,38 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Badan sampai bulan mei secara rata-rata 98,95, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 26,08%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 38,33%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Pengelolaan penginapan di Badan Penghubung tidak bisa dilakukan secara terbuka mengingat ada peraturan di wilayah DKI Jakarta yang menjadi pertimbangan
- Diperlukan perbaikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya tarik agar lebih banyak yang memanfaatkan penginapan di Badan Penghubung. Jika sarpras sudah lebih baik, kewajiban ASN untuk memanfaatkan penginapan di Badan Penghubung dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Optimalisasi peran Badan Penghubung untuk memfasilitasi Pemprov dengan DPD dan Kementerian/Lembaga dalam rangka koordinasi usulan program/kegiatan termasuk penyelesaian kendala atau permasalahan dalam pencapaian target-target pembangunan.

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dengan sasaran meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah dengan indikator produktivitas sub sektor peternakan

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 7,71 Miliar dari 18,12 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 10,42 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan Mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 22,81%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 12,04%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Pengadaan bibit benih ternak belum dilaksanakan karena proposal belum ada, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga belum ditetapkan

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Indikator kinerja utama Kepala Dinas terkait Jumlah produksi Daging dan produk telur, ini masih perlu didiskusikan karena terlalu rendah untuk menjadi IKU level Kepala Dinas
- Target-target yang sudah ditetapkan tentunya sudah didasarkan perhitungan kebutuhan. Jika anggaran yang teralokasi tidak sesuai, maka target-target tersebut harus disesuaikan kembali.
- Perangkat daerah harus dapat memetakan program/kegiatan prioritas yang didasarkan atas kebutuhan dan target-target yang sudah ditetapkan. Kriterianya dapat menggunakan relevansi peraturan perundang-undangan, kewenangan, efektivitas, dan lain-lain
- Capaian Nilai Tukar Petani secara umum rata-rata 105%, sudah baik. Namun perlu dipetakan per masing-masing Kabupaten/Kota untuk menentukan yang perlu dioptimalkan.
- Kegiatan untuk verifikasi dan validasi usulan kegiatan dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD agar dituangkan.
-

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

SEKRETARIAT DPRD

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Kesulitan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran RPD yang akan dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran perangkat daerah

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 6,17 Miliar dari 114,19 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 120,37 Miliar dalam DPA.

- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama terkait Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sampai bulan Mei secara rata-rata 100%, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 38,66%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 25,17%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Dukungan anggaran untuk fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD masih kurang

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Harapannya agar sekretariat DPRD dapat memfasilitasi program/kegiatan prioritas pada perangkat daerah dengan kegiatan dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah.

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan, tetapi besaran anggaran TA. 2024 sama dengan TA. 2023 sebesar 134 Miliar, untuk alokasi anggaran di Murni 2024 sebesar 120,37 miliar

DINAS SOSIAL

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dengan sasaran Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik), dengan Indikator Kinerja: Indeks Kesejahteraan Sosial

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 17,67 Miliar dari 68,50 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 86,16 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan Mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 19,49%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 16,29%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Sesuai dengan IKD dalam RPD 2024-2026, Dinas sosial menjadi lokomotif dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, untuk itu perlu memperhatikan 3 strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim dan pemetaan program/kegiatan

ekstrim dominan dari dinas social yaitu terkait pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan.

- Untuk bantuan sosial agar memprioritas pada keluarga yang tidak mendapatkan bantuan social, di data P3KE ada BNBA belum pernah menerima bantuan sosial.
- Sesuai IKU kepala Dinas, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak hanya sekedar tertangani saja, tetapi harus ada yang bisa mandiri dan keluar dari PPKS supaya ada hasil dari intervensi

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DINAS KESEHATAN

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dengan sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja: Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB)

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA berkurang pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 57,39 Miliar dari 195,15 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 137,77 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 11,53%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 32,11%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Banyak kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan namun lambat dalam pencairan keuangannya
- Sub kegiatan untuk pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular tidak muncul di SIPD RI untuk Provinsi NTB
- Alokasi anggaran untuk Jamkesmas sebesar Rp. 67M, seharusnya pencairan dapat dilakukan setiap bulan, namun baru akan dibayarkan per bulan Mei (5 bulan sekaligus). Pertimbangan kondisi fiskal daerah.

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Evaluasi Renja perlu diupdate sampai dengan kondisi Bulan Mei 2024

- Harus dapat dipastikan penerima Jamkesmas sebesar Rp. 67M adalah keluarga yang masuk dalam P3KE.
- Ada kecenderungan kenaikan kematian Ibu dan kematian bayi, supaya ini perlu dicarikan penyebab dan solusinya sehingga menjadi prioritas dalam rencana kerja

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Kesulitan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran RPD yang akan dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran perangkat daerah

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 8,83 Miliar dari 32,47 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 41,30 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 30,62%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 21,52%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Dispora masih mempertimbangkan keberlanjutan venue-venue yang direncanakan dibangun mulai dari nol maupun dengan renovasi prasarana yang sudah ada untuk pelaksanaan PON pada tahun 2028.

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Pemetaan kebutuhan atas pelaksanaan tusi Dispora dan Koni. Fokus Dispora pada olahraga pelajar, maka dipetakan kebutuhan tenaga pelatih, sarana dan prasarana pendukung, pembinaan, dan lain sebagainya.
- Rencana penggunaan anggaran hibah agar dapat dikritisi
- Diperlukan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, agar ruang lingkup sasaran kegiatan kepemudaan yang melibatkan beberapa perangkat daerah lebih terukur

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DINAS PUPR

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dengan sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 58,78 Miliar dari 327,14 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 385,93 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 31,73%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 20,17%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Perubahan nama kegiatan yang awalnya Rehabilitasi Kantor Gubernur menjadi Renovasi Kantor Gubernur berakibat pada mundurnya pelaksanaan tender. Lelang konstruksi akan dilaksanakan minggu depan, diperkirakan pertengahan bulan Desember 2024 fisik bangunan sudah selesai ($\pm$ 6 bulan).
- Sebanyak 2 paket bersumber dari DAK yang belum dilaksanakan sesuai rencana karena masih dalam tahap probity audit
- Terdapat puluhan paket pekerjaan sumur bor @Rp200.000.000 yang belum dilaksanakan karena ketidaksiapan dokumen administrasi (sertifikat kepemilikan lahan, dll) dan teknis (belum ada hasil survey geolistrik).
- Sarana dan prasarana eksisting di Bidang Jasa Konstruksi perlu dikalibrasi dan/atau diganti untuk optimalisasi PAD

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Perlu penyesuaian terhadap rumusan tujuan dan sasaran OPD dengan indikator Indeks Kualitas layanan infrastruktur Bidang PUPRD dan produktivitas sektor konstruksi
- Matriks evaluasi Renja TW I 2024 agar dilengkapi
- Bidang SDA agar segera melakukan rapat teknis terkait dengan pengadaan sumur bor, alternatifnya adalah dengan melengkapi dokumen administrasi dan melakukan survey geolistrik atau dengan melakukan perubahan kegiatan. Harus dikaji dari kebutuhan dan target-target perangkat daerah yang berimplikasi pada target-target pembangunan.
- Agar melakukan sosialisasi Perda RTRW yang baru

- Terkait dengan masifnya alih fungsi lahan, perlu optimalisasi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang
- Pemetaan skala prioritas atas seluruh program/kegiatan untuk memenuhi target-target perangkat daerah dan pemerintah daerah.

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DISTANBUN

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dengan sasaran meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah dengan indikator kinerja produktivitas sektor pertanian, dan sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultural, dan perkebunan.
- Perubahan ruang lingkup sektor pertanian dalam arti luas menjadi sub sektor khusus pertanian dan perkebunan

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 25,21 Miliar dari 123,88 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 149,09 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 24,76%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 16,67%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Alokasi anggaran sebagian besar dari pokir DPRD yang tidak bisa diarahkan terutama untuk mendukung pencapaian IKU dinas

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Harus perdalam kajian antara produksi pertanian versus perubahan iklim (curah hujan dan hari hujan 10 tahun terakhir), alih fungsi lahan (implementasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), kebutuhan konsumsi (pertumbuhan jumlah penduduk), akses jaringan/saluran irigasi, penyakit tanaman. Hal-hal ini sebagai dasar untuk menentukan kegiatan prioritas
- Kegiatan verifikasi dan validasi untuk diadakan

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DINAS PERKIM

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

Tujuan OPD : Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas

Sasaran OPD : (1) Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni, dan
(2) Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman

Adapun rumusan tujuan dan sasaran tersebut telah mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 pada tujuan keempat dan sasaran pertama yaitu Meningkatnya Pemerataan Pendapatan serta Kesejahteraan Lahiriah (fisik) dan rohaniah (Non Fisik), dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 304,14 Miliar dari 132,38 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 436,52 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 0,70%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 8,67%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Dukungan anggaran untuk mendukung penanganan Rumah Tidak Layak Huni sangat minim, lebih banyak anggaran tersedot ke Program PSU.
- Tambahan anggaran terutama untuk membayar utang tahun sebelumnya
- Ada beberapa Indikator Kinerja Kegiatan dan Program yang belum terisi baik itu di dalam Renstra OPD, Renja OPD maupun di dalam Dokumen APBD 2024.
- Dokumen RP3KP NTB dan beberapa Regulasi lainnya belum menjadi Acuan bagi para Anggota Dewan dalam melaksanakan Pokok-pokok Pikirannya.
- Ada 3 (tiga) Kabupaten yang belum selesai melakukan Validasi terhadap luasan Kawasan Kumuh yang dilaksanakan oleh BPPW NTB (Satker Kemen. PUPR)
- Pekerjaan-pekerjaan pada Program PSU masih belum berjalan dikarenakan temuan IRJEN KEMENDAGRI terkait Lokasi Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kewenangan Provinsi.
- Ada 46 dari total 171 lokasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang berada di luar Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi
- Dari hasil Verval di lapangan masih banyak terdapat BNBA yang tidak sesuai dengan kriteria penanganan Rumah Tidak Layak Huni baik itu Pembangunan Baru maupun Peningkatan Kualitas.
- Dalam Dokumen Renstra DISPERKIM belum memasukkan tentang UPT. RUSUN
- Dari hasil survey, tidak semua calon penerima bantuan memiliki kemampuan untuk operasional

Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan dari pokok-pokok pikiran Dewan akan diarahkan untuk pencapaian target-target dalam Dokumen Perencanaan sesuai dengan Kewenangan yang telah diatur dalam Regulasi baik dari Pusat maupun daerah;
- Data hasil Validasi Kawasan Kumuh yang telah dilakukan oleh BPPW NTB bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kewenangan yang telah diatur dalam Undang-undang baik dari Pusat, Provinsi, maupun Kab./Kota.
- Perlu konsistensi penganggaran antara Renstra (Rp254 M) dengan Renja (Rp131 M) dan DPA (Rp289M di luar hutang)
- Perlu dikaji pembangunan jalan lingkungan selama ini terhadap pencapaian target-target perangkat daerah dan pembangunan daerah

4. Usulan pada Perubahan Renja 2024

Adanya usulan penambahan Anggaran untuk pembayaran Hutang POKIR pada APBD Perubahan 2023 sebesar Rp. 161 M.

BAPPENDA

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dengan sasaran Meningkatnya kemandirian fiskal daerah, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 6,06 Miliar dari 135,73 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 141,79 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 30,34%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 16,67%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Belum ada progress sampai dengan Tri Wulan I sesuai dengan format

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Perbaiki tujuan, sasaran dan indikator
- Pendapatan bersumber dari dana transfer ke daerah harus tetap masuk dalam target dinas apalagi ada Bidang yang bertanggungjawab terkait target itu.

-

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum merumuskan usulan perubahan

DINAS PARIWISATA

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dengan sasaran meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah namun masih perlu disempurnakan karena belum mengarah pada produktivitas sektor terkait Kepariwisata (Sektor sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum).
-

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 7,83 Miliar dari 19,42 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 27,25 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 20,92%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan belum dapat diukur

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Sering gonta ganti SDM yang menangani perencanaan dan pelaporan sehingga diperlukan penyegaran kembali terkait perencanaan dan pelaporan kinerja

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Perlu Perbaikan indikator kinerja Eselon 2 dan 3
- Untuk pembenahan ke depan, lakukan pemetaan kebutuhan untuk peningkatan data tarik wisata: penataan destinasi prioritas sesuai Rencana Induk Pariwisata Daerah, analisis pasar, trend jumlah wisatawan per periode termasuk asalnya, dan sebagainya

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum menyampaikan usulan perubahan 2024

BAKESBANGPOLDAGRI

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Kesulitan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran RPD yang akan dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan dan

sasaran RPD yang beririsan tusi Bakesbangpol yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Unggul, Andal Dan Taqwa (KUAT), Indikator Kinerja: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan sasaran Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) dengan indikator Persentase penanganan konflik SARA, ATAU Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri, Indikator Kinerja: 1. Angka kemiskinan, 2. Prevalensi Stunting, dan 3. Gini rasio, dengan sasaran Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik), Indikator Kinerja: Indeks Demokrasi

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 33,35 Miliar dari 134,75 Miliar teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 168,10 Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 0,60%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 8,06%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- 17 kegiatan dii Renja yang dianggarkan hanya puluhan dan ratusan ribu saja, tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian target perangkat daerah. Tetruang di DPA sebanyak 3 kegiatan dengan anggaran @Rp. 55.000, sebanyak 5 kegiatan menjadi nol, dan 9 kegiatan naik signifikan
- Kabid 3 orang, Sekretaris: 1, hanya ada 1 orang Kabid
- Kendaraan operasional: jumlahnya kurang, yang diperlukan mobil lapangan.
- Rincian laporan belum lengkap
- Alokasi anggaran yang tersedia untuk belanja hibah termasuk untuk PILKADA, dan bakesbangpol tidak dilibatkan dari awal perencanaan

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Tidak semua program/kegiatan di Permendagri diambil, namun pilih yang mendukung pencapaian target saja
- Sasaran pembinaan agar difokuskan pada daerah rawan konflik (daerah narkoba dan miskin)
- Bentuk-bentuk aktivitas agar dapat difokuskan pada yang benar-benar mendukung pencapaian target
- Buat data base ormas-ormas yang perlu mendapat hibah
- Pendistribusian anggaran internal didasarkan pada bobot pekerjaan
- Moderasi beragama untuk dianggarkan di tahun 2025 (Perpres 58 tahun 2023)

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum menyampaikan usulan perubahan 2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Evaluasi Terhadap Keselarasan tujuan dan sasaran Strategis OPD dengan RPD 2024-2026

- Target dan sasaran sudah sesuai dengan RPD
- Target SPM diubah menjadi 100%
- Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan menengah/ sederajat

2. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja sampai Bulan Mei 2024

- Alokasi anggaran RENJA bertambah pada saat penetapan APBD/DPA sebesar 112,397 Miliar dari 1,72 triliun teralokasi dalam Renja yang ditetapkan menjadi 1,84 triliun Miliar dalam DPA.
- Capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja utama Dinas sampai bulan mei secara rata-rata belum dapat dihitung, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 15,19%, dan rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai 22,79%

3. Permasalahan dan Kendala OPD

- Anggaran lebih Rp112 M, tapi target SPM belum tercapai
- Anak-anak yang tidak bersekolah belum disentuh dengan program/kegiatan yang ada, misalnya melalui intervensi dengan pengadaan buku untuk anak-anak miskin. Ini belum optimal dilaksanakan karena penganggaran kegiatannya berasal dari PAD, sulit untuk dipastikan ketersediaannya.
- Kegiatan bantuan untuk Lembaga Sertifikasi Profesi berasal dari anggaran PAD, sulit untuk dipastikan ketersediaannya.
- Penganggaran perencanaan program/kegiatan belum mengakomodir kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD.
- Realisasi belum sesuai target disebabkan oleh rekapitulasi dari bidang-bidang dan cabang dinas belum masuk seluruhnya, dan kegiatan dari DAK belum dilaksanakan. Kegiatan dari DAK belum dilaksanakan karena dokumen administrasi masih dalam tahap review oleh Inspektorat dan Tim dari BPKAD terkait dengan perumusan tipe swakelola. Review baru dapat dilaksanakan karena Juklak/Juknis dari Kementerian baru terbit pada akhir Bulan April 2024.

4. Catatan Pendalaman oleh Tim Evaluator

- Perlu dijelaskan konsekuensi bila SPM belum mencapai 100%.
- Penyelenggaraan pendidikan juga ada yang dilakukan oleh masyarakat (oleh yayasan). Namun hal ini belum didata dengan baik dan belum diintervensi secara khusus oleh pemerintah daerah.
- Banyak SMA dan SMK yang sudah tidak ada aktivitasnya dan sudah beralih fungsi namun tetap tercatat statusnya sebagai SMA dan SMK. Ini perlu

dilakukan penataan lebih lanjut. Termasuk untuk penataan perizinan SMA dan SMK baru.

- Lakukan pemetaan permasalahan pengangguran dari lulusan SMK, dari aspek sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kurikulum, dan lain sebagainya.
- Pemetaan SMK yang memiliki *teaching factory*, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan hal terkait lainnya.
- Pemetaan atas kebutuhan dan kelayakan Ruang Kelas Baru, serta sarana dan prasana pendukung di SMA dan SMK

5. Usulan pada Perubahan Renja 2024

- Belum menyampaikan usulan perubahan 2024

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja sampai triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/RENJA OPD Provinsi NTB Tahun 2024 sebanyak 148 program prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.739.583.151.428 dan meningkat menjadi Rp6.205.414.024.675 pada APBD Tahun 2024 atau bertambah sebesar Rp465.830.873.247, dan realisasi mencapai sebesar Rp. 2.193.670.305.638 atau sebesar 38,22% Jika dibandingkan dengan triwulan I sebesar 22,04% dengan realisasi program masih 19,89 dan realisasi kegiatan sudah mencapai 39,89%. Rendahnya capaian ini dipengaruhi banyaknya program dan kegiatan yang belum dapat diukur pencapaiannya sampai triwulan II. Disamping itu, kegiatan-kegiatan fisik terutama bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus belum dapat dilaksanakan karena petunjuk teknis DAK yang baru ditetapkan pada akhir April 2024.
2. Dalam RKPD 2024 terdapat 12 Program, 61 Kegiatan, dan 377 Sub Kegiatan yang tidak mendapat alokasi anggaran dalam APBD/DPA. Dan terdapat beberapa program dialokasinya dibawah seratus ribu rupiah.
3. Masih terdapat beberapa Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum dilengkapi dengan indikator dan targetnya
4. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang bersumber dari dana BLUD yang tidak dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat daerah pengelola BLUD
5. Capaian indikator makro daerah pada tahun 2023 sebesar 66,67% pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 sampai triwulan II mencapai 50%.

6. Capaian IKU Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB 2024-2026 pada tahun 2023 mencapai 50%, sedangkan pada tahun 2024 sampai triwulan II baru mencapai 20% dari 10 (sepuluh) indikator. Adapun beberapa capaian indikator yang sangat mengembirakan diantaranya capaian Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB yang terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan ekspektasi yang telah 49,96% dan optimis bisa tercapai diatas 50% sesuai target akhir RPD Provinsi NTB pada tahun 2026. Pada indikator angka kemiskinan, meskipun belum memenuhi target, tetapi penurunan sampai triwulan ke II 2024 cukup signifikan mencapai 0,95% tertinggi dalam 5 tahun terakhir bahkan terprogres kedua se-indonesia. Hal yang sama pada ketimpangan pengeluaran penduduk juga mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 0,361 atau melampaui target sebesar 0,366. Sementara itu, pada indikator prevalensi stunting, mengalami penurunan yang sangat signifikan 13,49% pada tahun 2023, menurun menjadi 12,44% sampai triwulan II tahun 2024.
7. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2024 sebanyak 148 program prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.739.583.151.428 dan meningkat menjadi Rp6.205.414.024.675 pada APBD Tahun 2024 atau bertambah sebesar Rp465.830.873.247, dan realisasi sebesar Rp1.367.697.226.758,57 atau sebesar 22,04%, dan rata-rata capaian kinerja program sebesar 19,89%, dan rata-rata capaian kegiatan dan sub kegiatan sebesar 22,89%. Rendahnya capaian ini dipengaruhi banyaknya program dan kegiatan yang belum dapat diukur pencapaiannya sampai triwulan II. Disamping itu, kegiatan-kegiatan fisik terutama bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus belum dapat dilaksanakan karena petunjuk teknis DAK yang baru ditetapkan pada akhir April 2024.
8. Dalam RKPD 2024 terdapat 12 Program, 61 Kegiatan, dan 377 Sub Kegiatan yang tidak mendapat alokasi anggaran dalam APBD/DPA. Dan terdapat beberapa program dialokasinya dibawah seratus ribu rupiah.

9. Masih terdapat beberapa Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator dan targetnya
10. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang bersumber dari dana BLUD yang tidak dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat daerah pengelola BLUD

4.2 Rekomendasi

Untuk itu, berdasarkan kesimpulan dari hasil evaluasi maka upaya yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dalam perubahan rencana kerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terhadap indikator kinerja pemerintah daerah yang masih jauh dari ekspektasi pencapaiannya, maka perlu dilakukan pemetaan kembali program dan kegiatan dengan melakukan refocusing untuk optimalisasi pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Terhadap indikator dengan tingkat capaian pada tahun 2023 telah melampaui target tahun 2024, maka pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 perlu dilakukan exercise kembali untuk memproyeksikan targetnya.
3. Perangkat daerah perlu percepatan melengkapi admistrasi/dokumen tender agar proses tender bisa lebih cepat sehingga mempercepat progress pelaksanaan kegiatan/proyek.
4. Perlu memetakan kembali program-program prioritas sesuai dengan prioritas daerah pada RKPD Tahun 2024 yang disertai dengan kegiatan dan sub kegiatan prioritasnya.
5. Dengan adanya penambahan dan pengurangan pada beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD dan APBD Tahun 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam perubahan RKPD Tahun 2024.
6. Dengan adanya 12 Program, 61 Kegiatan, dan 377 Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 yang tidak mendapat alokasi anggaran dalam APBD/DPA. Dan terdapat beberapa program dialokasinya dibawah serratus ribu rupiah, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam perubahan RKPD Tahun 2024 atau

menghapus apabila tidak masuk dalam program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

7. Perlu dilengkapi dengan indikator dan targetnya terhadap beberapa Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2024
8. Perlu dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat daerah terhadap program dan kegiatan yang pelaksanaannya menggunakan sumber dana BLUD.